

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
WAY KAMBAS TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN**

(Studi pada Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung)

(Skripsi)

**Oleh
INTAN ANGGRAENI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE MANAGEMENT OF WAY KAMBAS NATIONAL PARK TOWARDS THE SOCIO ECONOMIC STATUS OF THE SOCIETY AROUND THE AREA

Study in the Way Kambas National Park, East Lampung

By

INTAN ANGGRAENI

This research aims to influence of the implementation of the policy on management of Way Kambas National Park towards the socioeconomic status of the society around the area. .This study uses quantitative methods of the explanatory type with a population of families of 1542 families (KK) and took samples from 94 people across 8 hamlet .

The results show that there are positive influence between implementation of the policy on management of Way Kambas National Park towards the socioeconomic status of the society around the area to the value of a simple linear regression equation of $Y = 0,187 + 0,861X$. The results of the calculation of the coefficient of determination (R^2) obtained a value of 0.777 which indicates the implementation of the policy on management of Way Kambas National Park towards the socioeconomic status of the people around the area which is categorized as strong. As for the percentage indicate the contributions variable influence of implementation of the policy on management of Way Kambas National Park (variable independent) of social economy status of the society area (variable dependent) is of 0,604 or 60,4 % . So that, expectations for next researcher that is could do similar research using variables or other indicators that the social economy status of the society around the area can be better.

Keywords: Implementation, policy , management , socioeconomic status

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN

Studi pada Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur

Oleh

INTAN ANGGRAENI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tipe eksplanatori dengan jumlah populasi sebesar 1542 Kepala Keluarga (KK) dan mengambil sampel sebanyak 94 orang yang tersebar di 8 Dusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan dengan nilai persamaan regresi linear sederhana sebesar $Y = 0,187 + 0,861X$. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,777 yang menunjukkan bahwa pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan dapat dikategorikan kuat. Adapun persentase menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh variabel implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas (variabel *independent*) terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan (variabel *dependent*) adalah sebesar 0,604 atau 60,4%. Sehingga harapan bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian sejenis dengan menggunakan variabel atau indikator yang lain sehingga kondisi perekonomian masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas dapat menjadi lebih baik.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, pengelolaan, status sosial ekonomi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
WAY KAMBAS TERHADAP STATUS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN**

(Studi pada Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung)

**Oleh
INTAN ANGGRAENI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
WAY KAMBAS TERHADAP STATUS
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
SEKITAR KAWASAN (Studi pada
Taman Nasional Way Kambas,
Lampung Timur, Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Intan Anggraeni*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416011049

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

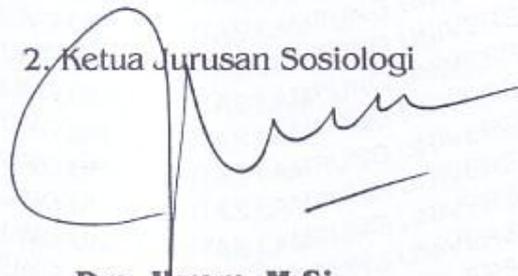
1. Komisi Pembimbing



Drs. Suwarno, M.H.

NIP 19650616 199103 1 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi



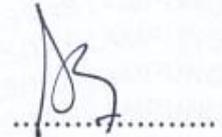
Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

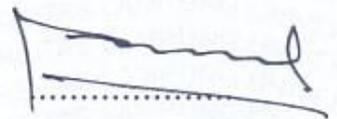
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Suwarno, M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Abdulsyani, M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 November 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
AE043ADG002042884
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Irfan Alghitani
NPM 1416011049



RIWAYAT HIDUP



Intan Anggraeni, dilahirkan pada tanggal 14 Maret 1996 di Metro, Lampung, anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Ir. Rusman dan Ibu Yeti Suparni.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

- TK Pertiwi Rajabasa Lama, Tridatu, Lampung Timur, Lampung pada 2001
- SD Negeri 1 Rajabasa Lama, Tridatu, Lampung Timur, Lampung pada 2002
- SD Negeri Labuan Bajo 2, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 2002
- SD Negeri Bugih V Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada 2008 dan lulus di tahun yang sama yaitu 2008
- SMP Negeri 1 Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada 2008
- SMP Negeri 1 Way Jepara, Lampung Timur, Lampung pada 2009 dan lulus pada 2011
- SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Lampung pada 2011 dan lulus pada 2014
- Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi 2014 dan lulus pada 2017

Lebih lanjut, penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN atau undangan. Penulis sempat meraih prestasi sebagai *Sociology Award* 2014 dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,97. Pada periode pertama Januari sampai dengan Maret 2017 (selama 40 hari), penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti beberapa kegiatan kampus, yaitu sebagai garda muda Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Beladiri Karate Universitas Lampung. Selain kegiatan intra kampus, penulis juga sempat mengikuti dan berpartisipasi menjadi *volunteer* di beberapa komunitas, seperti *Earth Hour* Lampung, *Hilo Green Community* Lampung, dan Jalan Inovasi Sosial (JANIS).

MOTTO

“Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, *you are what you think*. Jika kamu berpikir kamu bisa, kamu akan bisa, pun sebaliknya. Motivasi terbesar ada pada dirimu. *Everyone’s journey is different*. Jangan lelah untuk terus mencari, mencoba, sabar, dan ikhlas serta selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Hidup ini indah, maka lakukan yang terbaik dan kebaikan pun akan datang kepadamu. Semoga semesta selalu mendukungmu”

(Intan Anggraeni)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku Tercinta
Dr. Rusman dan Yeti Suparni

Kakakku Tersayang
Puliasamaya, S. Hut

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas
Bapak Drs. Sunarno, M. Sc dan Bapak Drs. Abdulsyani, M. S. P

Kawan-kawan Seperjuanganku
Sosiologi 2014

Almamaterku
*Keluarga Besar Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung*

Dan semua orang-orang baik dan terkasih yang sudah membantu penulis hingga
sampai tahap sekarang ini

Terimakasih atas dukungan, doa, saran, kritik yang telah diberikan kepadaku,
semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaiknya kepada kita semua,
Aamiin

SANWACANA



Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan *ilahi robbi*, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya *fiddini waddunya ilal akhiroh*.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan (Studi pada Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hidayah, karunia, bantuan, dukungan, doa, kritik dan saran, serta bimbingan yang berasal dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Ir. Rusman (Ayah) dan Yeti Suparni (Ibu), yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, doa, dukungan dan kasih sayang tak terhingga sampai saat ini sehingga Intan bisa menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyelesaikan studi sesuai harapan dan target. Tiada semangat dan motivasi terbesar Intan selain Ayah dan Ibu. Hanya doa dan usaha Intan untuk dapat membahagiakan dan membanggakan Ayah dan Ibu ke depannya kelak. Aamiin.
3. Kepada Kakak perempuanku tercinta Yuliasamaya, S.Hut yang selalu memberikan dukungan, saran dan kritik, serta semangat sampai saat ini sehingga Intan bisa menyelesaikan salah satu tugas yaitu menyelesaikan studi. Engkau saudara juga inspirasiku untuk terus belajar, berjuang, berproses, untuk dapat membahagiakan dan membanggakan keluarga juga orang terkasih di sekitar.
4. Kepada Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Kepada Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang sudah memberikan motivasi, saran dan masukan untuk kelancaran studi Intan dan dalam penyusunan skripsi ini serta menikmati prosesnya sampai akhir.
6. Kepada Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,

yang sudah sangat membantu Intan berproses selama studi sejak awal sampai saat ini, serta memberikan saran dan kritik dalam kelancaran skripsi ini. *Thankyou, Pak.*

7. Kepada Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak karena telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan memberikan semangat kepada Intan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sekali Bapak sudah sangat berjasa dan memberikan banyak pelajaran kepada Intan, sejak awal bimbingan sampai selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah kepada Bapak dan keluarga, Aamiin.
8. Kepada Bapak Drs. Abdulsyani, M.I.P selaku penguji utama dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak atas semua kritik dan saran yang telah Bapak berikan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Terimakasih sekali Bapak sudah sangat berjasa dan memberikan banyak pelajaran kepada Intan, sejak awal sampai selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah kepada Bapak dan keluarga, Aamiin.
9. Kepada Ibu Dra. Yuni Ratnasari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih Ibu atas bimbingan, saran, kritik yang sudah Ibu berikan kepada Intan.
10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

11. Kepada Abang dan Mba sosiologi 2010, 2011, 2012, 2013. Terimakasih atas kritik dan saran selama ini. Sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.
12. Kepada teman-teman sosiologi 2014 yang Intan sayangi dan banggakan. Kalian luar biasa! Sungguh! Terimakasih untuk 3 tahun masa-masa perkuliahan selama ini, terimakasih sudah menjadi bagian dari Intan dan menerima Intan menjadi bagian dari kalian, terimakasih untuk canda tawa dan drama-drama perkuliahan. Maaf jika selama ini Intan banyak menyusahkan, menyebalkan, dan hal-hal lainnya. *Life keep on turning!* Sukses selalu untuk kita semua. Tetap solid sampai kapanpun ya. Salam peluk cium dan jabat erat untuk kalian semua, yang terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu nama-namanya.
13. Kepada sahabat-sahabatku (yang terkadang pamrih dan ga tau diri tapi bikin kangen hahaha) Gengs; Evita, Bonita, Ariz, Ira, Putri, Inggar, Faiza, Nova, Dina, Evi, dan Trias. Terimakasih atas semua cerita yang sudah terjalin selama ini, terimakasih sudah ikhlas menerima Intan sebagai bagian dari kalian, walaupun terkadang Intan ga nyambung kalian lagi bahas apaan tapi kalian tetap sahabat terbaik, maaf jika selama proses skripsi ini Intan menyebalkan kalian hahaa. Tetap menjadi kita ya sampai kapanpun, sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.
14. Kepada teman-teman sosiologi 2015, 2016, dan 2017, terimakasih atas dukungan dan semangat kalian selama ini.
15. Kepada teman-teman KKN Periode 1 Unila 2017 Desa Fajar Asri; Tya, Fika, Rida, Hekson, Ogi, dan Yuda. Terimakasih atas cerita selama KKN,

ayok geh pada ngumpul lagi hahaa. Sukses selalu untuk kita semua.
Aamiin.

16. Kepada teman-teman Kosan Putri Biru; Evita, Ira, Aris, dan Denita, terimakasih atas kegilaan dan cerita selama setiap hari pagi siang sore. Pokoknya kalian terbaiks hahaa.

17. Kepada sahabat-sahabatku Shinta, Gia, Chika, Resty, Eka, Lala, Kiki, Nana, Rendy, Yadu, dan yang lainnya, terimakasih atas dukungan kalian. Sukses selalu untuk kita semua. Aamiin.

18. Kepada seluruh pihak yang sudah banyak membantu dalam proses Intan studi dan menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada pihak Taman Nasional Way Kambas dan masyarakat Desa Braja Harjosari, terimakasih.

19. Kepada Bapak Sumaryo Gito Saputro dan Ibu Diah Retnowati, Mas Panji Prasetyo Putro, Adik Hafidz Riza Setiawan, Adik Arjuna Ilham Kusuma, dan Adik Anggita Prasastya Widyasari. Terimakasih sudah menjadi keluarga kedua Intan selama di tanah rantau sini hehee, terimakasih atas semua dukungan dan kasih sayang yang sudah diberikan. Hanya doa terbaik yang Intan dapat haturkan dan semoga akan selalu mengalir kepada Bapak, Ibu, Mas Panji, dan Adik-adik, semoga silaturahmi kita akan selalu erat. Aamiin.

20. Kepada yang terkasih Mas Panji Prasetyo Putro, S.T terimakasih sudah menemani Intan berproses sejak awal hingga saat ini. Terimakasih atas dukungan, kritik, saran, cerita canda dan tawa, serta pelajaran yang luar biasa. Tetaplah menjadi Mas Panji yang Intan kenal, semoga ke depannya diberikan yang terbaik untuk kita. Sukses selalu dan tetap semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan penambahan wawasan bagi para pembaca, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Bandar Lampung, 7 Desember 2017

Tertanda,

Intan Anggraeni
NPM. 1416011049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori.....	14
1. Kajian tentang Implementasi	14
2. Tinjauan Tentang Kebijakan.....	15
a. Pengertian Kebijakan	15
b. Tahap Kebijakan	17
3. Tinjauan Tentang Pengelolaan.....	19
4. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	20

a. Model Implementasi Kebijakan.....	23
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	36
5. Tinjauan Tentang Sosial Ekonomi	38
a. Status Sosial.....	40
b. Status Ekonomi.....	42
c. Status Sosial Ekonomi	43
6. Kajian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat).....	47
7. Kerangka Teori	48
B. Kerangka Penelitian Terdahulu.....	51
C. Kerangka Berpikir.....	53
D. Hipotesis	62

III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	64
B. Definisi Konseptual	65
1. Variabel <i>Independent</i> (X)	65
2. Variabel <i>Dependent</i> (Y)	66
C. Definisi Operasional	66
1. Implementasi Kebijakan	66
2. Status Sosial Ekonomi Masyarakat.....	69
D. Lokasi Penelitian.....	73
E. Unit Analisis	74
F. Populasi dan Sampel.....	74
G. Teknik Pengumpulan Data.....	76
1. Pengamatan (<i>Observasi</i>).....	77
2. Angket.....	77
3. Wawancara (<i>Interview</i>)	77

4. Penelitian Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	78
H. Teknik Pengolahan Data.....	78
1. Pengeditan Data (<i>Editing</i>).....	78
2. Memasukkan Data (<i>Input Data</i>)	79
3. Pengolahan (<i>Processing</i>)	79
4. Hasil (<i>Output</i>)	79
I. Teknik Analisis Data.....	80
1. Uji Asumsi Klasik.....	80
a. Uji Normalitas Data	80
b. Uji Linearitas Data.....	81
c. Uji Homogenitas Data	82
2. Uji Hipotesis	82
a. Analisis Regresi Linear Sederhana	83
b. Uji F (F-test)	85
c. Koefisien Determinasi (R^2)	86

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Taman Nasional Way Kambas	88
1. Sejarah Singkat Taman Nasional Way Kambas	88
2. Hidrologi Kawasan Taman Nasional Way Kambas.....	91
3. Topografi Kawasan Taman Nasional Way Kambas.....	92
4. Iklim, Suhu, dan Kelembaban Taman Nasional Way Kambas	94
a. Iklim.....	94
b. Suhu dan Kelembaban	95
5. Ekosistem Kawasan Taman Nasional Way Kambas	96
6. Potensi Wisata Alam di Taman Nasional Way Kambas.....	100
a. Plang Ijo.....	100
b. Pusat Konservasi Gajah (PKG)	102

c. Suaka Rhino Sumatera (SRS).....	104
d. Way Kanan	106
e. Kuala Kambas.....	108
7. Daerah atau Desa Penyangga Taman	
Nasional Way Kambas.....	109
a. Demografi	110
1. Struktur Penduduk.....	110
2. Kepadatan Penduduk.....	110
b. ..Status Sosial Ekonomi	111
1. Sosial Budaya.....	111
2. Struktur Perekonomian	112
3. Pola Penggunaan Lahan	112
B. Gambaran Umum tentang Desa Harjosari	113
1. Sejarah Singkat Desa Harjosari.....	113
2. Kondisi Geografis	116
a. Luas dan Batas Desa Braja Harjosari.....	116
b. Orbitasi.....	118
c. Sarana dan Prasarana.....	119
d. Sketsa Wilayah Desa Braja Harjosari	125
3. Kondisi Demografi.....	126
a. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga	126
b. Kondisi Status Sosial Ekonomi	127

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	131
B. Pelaksanaan Atau Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan	136
C. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Terhadap	

Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan	194
D Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi	
Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way	
Kambas Terhadap Status Sosial Ekonomi	
Masyarakat Sekitar Kawasan	211
E Uji Asumsi Klasik.....	212
1. Uji Normalitas Data	213
2. Uji Linieritas	214
3. Uji Homogenitas Data	215
F Uji Hipotesis	216
1. Analisis Regresi Linier Sederhana	216
2. Uji F (F-Test)	218
3. Koefisien Determinasi (R^2)	220
G Pembahasan	222
Pelaksanaan atau Implementasi	
1. Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional	
Way Kambas Terhadap Status Sosial	
Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan.....	224
2. Status Sosial Ekonomi Masyarakat	
Sekitar Kawasan (Desa Braja Harjosari, Lampung Timur)	
Secara Keseluruhan Dari Adanya	
Implementasi Kebijakan Pengelolaan	
Taman Nasional Way Kambas.....	226
3. Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan	
Taman Nasional Way Kambas Terhadap	
Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan	228
4. Faktor Pendukung dan Penghambat	
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman	
Nasional Way Kambas Terhadap Status	
Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan.....	229

VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	231
B. Saran.....	234

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Aplikasi Konseptual George C. Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan.....	32
2. Definisi Operasional	73
3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	87
4. Nama Kepala Desa Braja Harjosari	115
5. Luas Wilayah Desa Braja Harjosari.....	117
6. Orbitasi Desa Braja Harjosari	118
7. Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Braja Harjosari	119
8. Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Desa Braja Harjosari	120
9. Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Desa Braja Harjosari.....	121
10 Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Braja Harjosari.....	121
11 Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Braja Harjosari	122
12 Sarana dan Prasarana Hiburan dan Wisata Desa Braja Harjosari	123
13 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Braja Harjosari	123
14 Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal Desa Braja Harjosari	124
15 Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Desa Braja Harjosari	125
16 Jumlah Penduduk di Desa Braja Harjosar.....	126
17 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Braja Harjosari.....	127
18 Mata Pencarian Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	127

19	Agama Masyarakat Desa Braja Harjosari	128
20	Etnis atau Suku Masyarakat Desa Braja Harjosari	129
21	Pendidikan Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	129
22.	Identitas Responden Berdasarkan Alamat	132
23.	Identitas Responden Berdasarkan Umur	134
24	Respon Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator-Indikator Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, dan Struktur Birokrasi	152
25	Status Sosial Ekonomi Responden (Masyarakat Desa Braja Harjosari)	176
26.	Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pendidikan) Masyarakat Sekitar Kawasan	180
27.	Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pekerjaan) Masyarakat Sekitar Kawasan	184
28.	Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Terhadap Status Sosial Ekonomi (Penghasilan) Masyarakat Sekitar Kawasan	188
..29.	Hasil Uji Normalitas Data	213
30.	Hasil Uji Linieritas Data	214
31.	Hasil Uji Homogenitas Data	215
32	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	217
33.	Hasil Perhitungan Uji F (F-test).....	218
34.	Hubungan dan Besaran Pengaruh antara Variabel <i>Dependent</i> dan Variabel <i>Independent</i>	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	28
2. Kerangka Berpikir tentang Taman Nasional.....	53
3 Kerangka Berpikir tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan	58
4 Skema Wilayah Desa Braja Harjosari	126
5 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	133
6. Identitas Responden Berdasarkan Suku	135
7. Identitas Responden Berdasarkan Agama.....	136
8. Respon Terhadap Program Peningkatan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Melalui Komunikasi Bersama Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran	138
9 .Respon Terhadap Adanya Komunikasi Dan Metode Yang Intensitas Melalui Sosialisasi Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran	139
10. Respon Terhadap Adanya Kemampuan Pihak Taman Nasional Way Kambas Untuk Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Dengan Memerhatikan Tingkat Pendidikan	

Serta Pemahaman Terhadap Tujuan Dan Sasaran Program Pengelolaan Secara Detail Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran.....	141
11. Respon Terhadap Adanya Kemampuan Untuk Dapat Menyampaikan Program Kebijakan Pengelolaan Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran	143
12. Respon Terhadap Adanya Ketersediaan Dan Kemampuan Memprediksi Alokasi Dana Untuk Menjalankan Program Kebijakan Pengelolaan Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran	144
13. Respon Terhadap Adanya Tingkat Komitmen Dan Kejujuran Serta Konsistensi Dalam Menjalankan Program Kebijakan Pengelolaan Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran	146
14. Respon Terhadap Adanya Tingkat Demokratis Dalam Menjalankan Program Kebijakan Pengelolaan Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran	147
15. Respon Terhadap Adanya SOP Yang Mudah Dipahami Dalam Menjalankan Program Kebijakan Pengelolaan Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran.....	149

16. Respon Terhadap Adanya Struktur Organisasi Serta Rentang Kendali Dalam Menjalankan Program Kebijakan Pengelolaan Dari Pihak Taman Nasional Way Kambas Kepada Masyarakat Desa Braja Harjosari Sebagai Kelompok Sasaran.....	150
17. Implemetasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Secara Keseluruhan	156
18. Tingkat Pendidikan Terakhir (Tamatan) Responden	159
19. Kedudukan Responden Di Masyarakat	160
20. Pekerjaan Utama Responden Saat Ini	161
21. Pekerjaan Sampingan Responden Saat Ini	162
22. Jumlah Tanggungan Responden Saat Ini	163
23. Jumlah Penghasilan Perbulan Responden Saat Ini.....	164
24. Anggota Keluarga Responden Yang Ikut Membantu Bekerja Saat Ini.....	166
25. Kekayaan Responden Berupa Benda Bergerak Saat Ini	167
26. Kekayaan Responden Berupa Benda Tak Bergerak Saat Ini	168
27. Status Kepemilikan Tanah Responden Saat Ini	169
28. Status Kepemilikan Rumah Responden Saat	170
29. Jenis Rumah Responden Saat Ini	172
30. Jenis Lantai Rumah Responden Saat Ini.....	173
31. Bahan Bakar Utama Responden Untuk Memasak Saat Ini.....	174
32. Kisaran Luas Pekarangan atau Halaman Rumah Responden Saat Ini	175
33. Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Dari Adanya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas.....	178
34. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas	

Dilihat Dari Indikator Komunikasi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pendidikan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	196
35. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Komunikasi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pekerjaan) Masyarakat Desa Braja Harjosari	197
36 Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Komunikasi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Penghasilan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	198
37 Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Sumber Daya Manusia Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pendidikan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	199
38. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Sumber Daya Manusia Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pekerjaan) Masyarakat Desa Braja Harjosari	201
39. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Sumber Daya Manusia Terhadap Status Sosial Ekonomi (Penghasilan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	202
40. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Disposisi Terhadap Status	

Sosial Ekonomi (Pendidikan) Masyarakat Desa Braja Harjosari	203
41. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Disposisi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pekerjaan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	205
42. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Disposisi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Penghasilan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	206
43. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pendidikan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	207
44. Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Pekerjaan) Masyarakat Desa Braja Harjosari	209
45 Dampak Atau Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas Dilihat Dari Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Status Sosial Ekonomi (Penghasilan) Masyarakat Desa Braja Harjosari.....	210

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa memiliki keragaman yang melimpah. Kekayaan ini terbentang dari ujung Barat hingga Timur Indonesia. Keragaman tersebut salah satunya yaitu berbentuk keragaman hayati yang terlihat dari adanya hutan dan ekosistem biotik yang termasuk di dalamnya yaitu Taman Nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Bab 1 pasal 1 ayat 14 mendefinisikan bahwa:

“Taman Nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.”

Merujuk pada definisi menurut Undang-Undang tersebut, terlihat bahwa kekayaan Indonesia yang berbentuk taman nasional sangat penting akan eksistensi keberadaannya, bukan hanya sebagai kawasan untuk melindungi ekosistem (flora dan fauna) namun juga salah satunya sebagai kawasan dengan tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia jumlah atau keberadaan taman nasional hingga 2016 tercatat ada 51 taman nasional yang tersebar dengan di dalamnya memiliki masing-masing keanekaragaman hayati yang di setiap tempatnya berbeda dengan yang lainnya. Sebagai contoh, di Lampung terdapat Taman Nasional Way Kambas yang mana di dalamnya merupakan kawasan untuk melindungi atau melestarikan gajah sumatera dan ekosistemnya, berbeda dengan Taman Nasional Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur yang merupakan kawasan konservasi untuk melindungi satwa endemiknya yaitu komodo beserta lingkungannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Bab VII pasal 30 menyebutkan bahwa:

“Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Suatu taman nasional dicirikan oleh keberadaannya sebagai kawasan konservasi untuk melindungi kawasan alami dan berpemandangan indah yang penting secara nasional ataupun internasional serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Kawasan alam ini relatif cukup luas dan materinya tidak diubah oleh kegiatan manusia serta pemanfaatan sumber daya. Secara terperinci, suatu taman nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) mempertahankan contoh ekosistem dalam kondisi alaminya;
- (2) mempertahankan keanekaragaman ekologi dan pengaturan lingkungan;
- (3) melestarikan sumber daya plasma nutfah;

- (4) menyediakan pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan;
- (5) melestarikan kondisi kawasan tangkap air;
- (6) mengendalikan erosi, sedimentasi dan melindungi investasi kawasan liar;
- (7) menyediakan pelayanan rekreasi dan pariwisata;
- (8) melindungi keindahan alam dan tempat terbuka;
- (9).mendorong pemanfaatan rasional dan berkelanjutan dari kawasan marginal dan pembangunan.

Taman nasional memiliki fungsi dan manfaat sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Bab VII pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Di dalam Taman Nasional dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.”

Dimana pada suatu taman nasional terdapat zonasi atau penetapan kawasan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56 /Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan, Bab II pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Taman Nasional memiliki; (1) zona inti, yaitu mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia; (2) zona rimba, yaitu kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar; (3) zona pemanfaatan, yaitu kawasan yang mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik, serta mempunyai luasan yang cukup

untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; (4) zona lainnya, yaitu kawasan seperti zona tradisional, rehabilitasi, religi, budaya, dan sejarah. Penataan dan penetapan zonasi taman nasional tersebut didasarkan pada potensi dan juga fungsi yang ada di setiap taman nasional dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan juga budaya.”

Adapun peraturan atau aturan yang mengatur mengenai taman nasional dan kebijakan pengelolaannya terdapat diantaranya yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (penetapan Taman Nasional dan pengelolaan), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

Di Lampung, terdapat dua buah taman nasional yang terkenal, yaitu Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Disini peneliti fokus pada Taman Nasional Way Kambas sebagai lokasi penelitian untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar

kawasan. Taman Nasional Way Kambas terletak di kabupaten Lampung Timur, sekitar 3 jam perjalanan darat dari pusat ibukota provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung. Secara geografis, kawasan Taman Nasional Way Kambas dibatasi oleh batas alam dan batas buatan. Batas alam terdiri dari batas langsung dengan sungai dan laut. Batas buatan berbatasan langsung dengan areal pemukiman dan perladangan masyarakat. Sebelah timur kawasan dibatasi oleh pantai Laut Jawa sepanjang 65 Km di bagian pesisir pantai, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Way Sukadana sepanjang 18 Km, sebelah tenggara dibatasi oleh Sungai Way Pegadungan dan sebelah utara dibatasi oleh Sungai Way Seputih. Di antara Way Penet dan Way Sukadana terdapat batas buatan sepanjang 29 Km. Untuk areal pemukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan ini antara lain di sebelah selatan yaitu Sukadana, Rajabasa Lama, Jepara, Sribawono, Labuhan Maringgai dan Kuala Penet, sedangkan di sebelah barat adalah Purbolinggo, Bungur, Kota Gajah, Rumbia dan Seputih Surabaya.

Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu taman nasional yang sangat kaya, baik dari segi keberagaman jenis maupun dari segi estetika serta keunikannya. Oleh sebab itu, Taman Nasional Way Kambas mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan kehutanan di provinsi Lampung khususnya, maupun pembangunan secara nasional. Dalam era saat ini, pembangunan kehutanan telah memprioritaskan pembangunan di bidang konservasi. Hal ini sesuai dengan visi dan misi paradigma pembangunan kehutanan yang berorientasi pada:

- (1).keseimbangan aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan ekosistem;
- (2). pemanfaatan fungsi ganda (*multi purpose forest management/resources based management*);
- (3).meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*community based management*).

Dengan demikian pembangunan taman nasional sebagai salah satu kawasan konservasi diarahkan untuk meningkatkan peran kawasan dan sumber daya alam guna peningkatan masyarakat serta mutu kehidupan. Konsep pembangunan taman nasional ini merupakan pembangunan terpadu (*integrated conservation development program*) yang menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh komponen sumber daya alam dan ekosistemnya serta komponen masyarakat yang berada di sekitar guna memadukan aspek manfaat dan kepentingan taman nasional.

Adapun tujuan dari kebijakan pengelolaan taman nasional, yaitu:

- (1). pemantapan pengelolaan kawasan;
- (2). penanggulangan terhadap segala bentuk gangguan;
- (3). peningkatan profesionalisme dan peran masyarakat;
- (4). pemberdayaan potensi;
- (5). peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain tujuan dari kebijakan pengelolaan, terdapat juga sasaran dari kebijakan pengelolaan yaitu:

- (1). mewujudkan dan menjamin keberadaan (eksistensi) sumber daya alam guna mendukung ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2). melaksanakan pengelolaan sumber daya alam sesuai asas kelestarian dan optimalisme sumber daya manusia serta menjamin terbukanya peran serta masyarakat;
- (3). mencegah terjadinya degradasi fungsi dan komponen lingkungan serta menjamin distribusi manfaat sumber daya alam yang adil dan merata.

Program atau kebijakan pengelolaan yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas pada saat ini meliputi:

- (1). program pemantapan status kawasan, upaya ini bertujuan memantapkan keberadaan suatu taman nasional secara jelas baik dari segi hukum maupun fisik kawasannya;
- (2). program penataan kawasan, sesuai dengan tujuan dan konsepsi pengelolaan taman nasional, dilakukan penataan kawasan. Penataan kawasan ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan ruang dengan mempertimbangkan faktor potensi dan fungsi. Bentuk penataan kawasan ini berupa pembagian zonasi di taman nasional;
- (3). program pemantapan pengelolaan, kinerja yang baik dalam suatu pengelolaan kawasan merupakan tuntutan jaman, terutama dalam menyongsong era globalisasi yang sedang dialami saat ini. Untuk maksud tersebut pemantapan pengelolaan melalui profesionalisme sumber daya manusianya perlu didukung pula baik perangkat lunak

maupun perangkat kerasnya. Lebih lanjut perencanaan yang baik merupakan kunci utama dalam upaya pematapan pengelolaan;

- (4). program pembinaan potensi; dalam upaya optimalisasi fungsi, pembinaan potensi sangat diperlukan baik kegiatan yang menyangkut survey dan identifikasi maupun perlindungan jenis dan ekosistem serta pembinaan rehabilitasinya. Dengan demikian peranan potensi yang ada dapat tetap terjaga dan berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Di samping potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar kawasan merupakan salah satu program dalam upaya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen masyarakat disini merupakan salah satu aspek yang dibangun sesuai konsep pembangunan yang menyeluruh dan terpadu;
- (5). program pengembangan potensi, dalam upaya mendukung pelestarian secara optimal fungsi kawasan serta manfaatnya pengembangan potensi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu program prioritas, sehingga manfaat baik langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan dan diakses masyarakat luas. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat serta memotivasi kepeduliannya terhadap sumber daya alam dan eksistensinya di samping pengembangan potensi sosial ekonomi dan budaya yang ada. Adapun pengembangan potensi ini mencakup kegiatan seperti pengembangan wisata alam, pengembangan daerah penyangga, pengembangan adat dan budaya, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan;

- (6). program pemberdayaan masyarakat, kemitraan merupakan salah satu kunci dalam pengelolaan taman nasional, oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung kerjasama dalam berbagai kegiatan yang ada. Pemantapan kelembagaan serta pelatihan merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat di samping akses termasuk informasi yang diperlukan;
- (7). program pemantapan pengamanan hutan, dalam upaya pengamanan hutan ditekankan pada kesadaran masyarakat melalui tindakan preventif seperti kegiatan penyuluhan, patroli wilayah, pelatihan serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait serta masyarakat di sekitar kawasan. Tindak represif dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang telah ditetapkan secara lugas, tegas, dan transparan. Pemantapan pengamanan hutan dilakukan pula dengan meningkatkan kemampuan personil polisi hutan terkait dengan hal tersebut maka upaya pemantapan sarana dan prasarana sebagai dukungan operasional telah diprioritaskan; dan
- (8). program monitoring dan evaluasi, dalam suatu pengelolaan diperlukan monitoring dan evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam upaya pengelolaan taman nasional.

Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini mempelajari bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Beberapa pengaturan diterapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, seperti

Undang-Undang dan Peraturan, Rencana Strategi, Visi dan Misi, Rencana Program dan Kegiatan, dan Tingkat atau Pencapaian tentang Pengelolaan dan Perencanaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu.

1. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan di Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan pengelolaan dan perencanaan terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas (dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan)?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan yang ada di Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak, baik positif maupun negati dari implementasi pengelolaan yang ada di Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan masyarakat sekitar kawasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini bagi pihak internal adalah memberi masukan bagi pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, sehingga pihak Taman Nasional dapat merumuskan rencana dan kegiatan yang lebih baik serta mengimplementasikannya. Sedangkan bagi pihak eksternal, unit pengelolaan Taman Nasional Way Kambas dapat memberikan data yang dibutuhkan pemerintah pusat atau pihak luar lainnya. Hasil kinerja atau implementasi dari kebijakan pengelolaan di Taman Nasional Way Kambas yang diperoleh pun dapat menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam mengelola kawasan konservasi seperti Taman Nasional.

Selain itu terdapat pula beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritik

- a. Untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Menambah pemahaman masyarakat umum, khususnya masyarakat sekitar kawasan mengenai pengelolaan kebijakan Taman Nasional Way Kambas mengenai status sosial ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Pada bagian ini dideskripsikan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian yaitu kajian tentang implementasi, kajian tentang kebijakan, kajian tentang pengelolaan, kajian tentang implementasi kebijakan (model, serta faktor pendukung dan penghambat), kajian tentang status sosial ekonomi, kajian tentang pemberdayaan masyarakat desa.

1. Kajian tentang Implementasi

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide,

proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002).

2. Tinjauan Tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris “*policy*” yang menunjuk pada prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Istilah “kebijakan” menurut Lasswell (1948) dalam Parson (2005) dipakai untuk menunjukkan perlunya penjelasan tujuan-tujuan sosial yang harus diberikan oleh bidang keilmuan. Menurut Heinz Ealau dan Kenneth Prewitt (1973) dalam Suharto (2008), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang

membuatnya maupun yang mentaatinya. Sedangkan menurut Amara Raksasataya dalam Lubis (2007), kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Menurutnya ada tiga unsur dalam kebijakan, yaitu identifikasi tujuan yang akan dicapai, strategi untuk mencapainya, dan penyedia berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Konsep yang sama diidentifikasi oleh Lasswell dan Kaplan dalam Lubis (2007) yang menilai kebijakan sebagai “sarana” untuk mencapai “tujuan”. Kebijakan tertuang dalam “program” yang diarahkan kepada pencapaian “tujuan”, “nilai”, dan “praktek”. Masih dalam Lubis (2007), Hugh Heglo pun menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang dimaksud mencapai tujuan tertentu. Selain itu, menurut Wibawa (1994) suatu kebijakan dibuat oleh sistem dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang merumuskan kebijakan, untuk memenuhi tuntutan seseorang atau sekelompok aktor.

Seorang pakar ilmu politik lainnya, Richard Rose (1969) dalam Winarno (2012) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Definisi ini bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Namun demikian, menurut Anderson (1975) dalam Winarno (2012) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini sangat tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan, bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

b. Tahap Kebijakan

Proses pembuatan suatu kebijakan merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan, membagi proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno (2012) antara lain sebagai berikut.

- (1). Tahap penyusunan agenda, ialah tahap saat para pejabat yang dipilih dan diangkat memilih dan menempatkan masalah pada agenda publik dan memasukkannya pada agenda perumusan kebijakan.
- (2). Tahap formulasi kebijakan, ialah tahap saat masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang sudah ada.

- (3). Tahap adopsi kebijakan, ialah saat memilih dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan untuk diadopsi, dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- (4). Tahap implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
- (5). Tahap evaluasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Melalui paparan di atas, tahapan kebijakan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Kebijakan meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan tahapan implementasi kebijakan yaitu proses implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

3. Tinjauan Tentang Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997).

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.

- (1). Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- (2). Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- (3). Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

4. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan kajian dari studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006) dalam Pasolong (2010) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Masih dalam Pasolong (2010), Hinggis (1985) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Lebih lanjut Gordon (1986) dalam Pasolong (2010) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Seperti pendapat Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, atau jenis keluaran yang nyata. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program di lapangan. Sedangkan kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai obyek kebijakan.

Implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah keluarnya *outcome* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang krusial dalam studi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Islamy (2001) dalam jurnal ilmiah Administrasi Publik (2006) bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya merupakan kerja sama antara

birokrasi (*state*), pasar (*market*), dan komunitas (*civil society*). Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000) dalam Agustino (2008) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses atau suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau

dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Hal ini jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Merrile Grindle (1980) masih dalam Agustino (2008) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

a. Model Implementasi Kebijakan

Model dalam buku Indiahono (2009) adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar tingkat awal. Menurut Agustino (2008) pendekatan model “*top-down*”, merupakan pendekatan implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keoutusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan “*top-down*” bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-

administrator pada level di bawahnya, sedangkan pendekatan model “*button-up*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Implementasi kebijakan mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya yaitu.

(1) Model Implementasi Kebijakan Donal Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini menurut Van Metter dan Carl Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakna berjalan secara linier dari keputusan yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan. Terdapat 6 (enam) variabel menurut Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008) yang mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut adalah.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio ekonomi dan kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Karakter agen pelaksanaan

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan.

4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan implementasi.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat memicu kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

(2) Model Implementasi Kebijakan Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian

Model Paul A Sabatier dan Daniel Mazmanian dalam Wahab (2004) mengatakan bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya

tujuan dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar menurut Agustino (2008), yaitu.

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan, meliputi.
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur
 - c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat, meliputi.
 - a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
 - c. Ketetapan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
 - g. Akses formal pihak-pihak luar

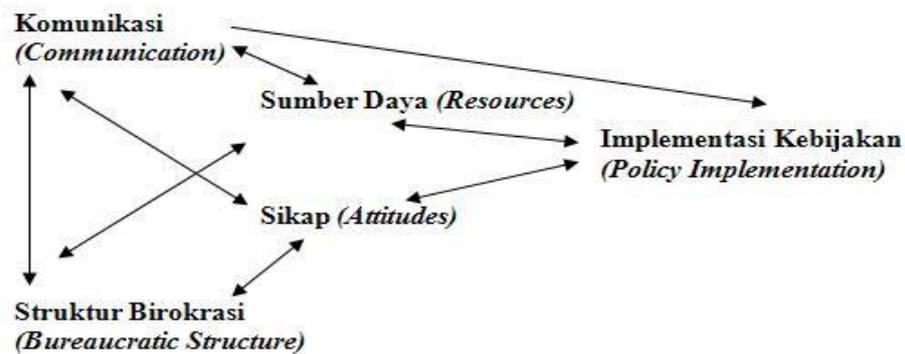
3. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi proses implementasi, meliputi.
 - a. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

(3). Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berpersektif *top-down* ini dikembangkan oleh George C. Edward III. Pendekatan yang dikemukakan olehnya mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu.

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Keempat variabel tersebut dapat diaplikasikan dalam model pendekatan pada bagan berikut ini.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Sumber: Edward III (1980) dalam Indiahono (2009)

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Menurutnya, komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat diasosiasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau kesalahpahaman atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program kebijakan, amak akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Komunikasi menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Lebih lanjut dijelaskan menurut Edward III dalam Agustino (2008), kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya oleh karena sumber daya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah sumber daya saja tidaklah cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan sumber daya dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya finansial menurut George C, Edward III dalam Indiahono (2009) adalah kecukupan modal intervensi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam

implementasi kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah disposisi. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009), disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* (kerangka kerja) suatu program kebijakan.

Komitmen dan kejujuran implementor membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program kebijakan. Menurut George C. Edward III dalam Agustino

(2008), jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bias.

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktu birokrasi. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009), struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal yang penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mencantumkan dengan *guideline* program kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2008), SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus

dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Menurut Edward III dalam Agustino (2008), ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Selain itu, terdapat pula aplikasi konseptual dari model implementasi Edward III yang dapat dilihat berikut ini.

Tabel 1. Aplikasi Konseptual George C. Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	a. Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan. b. Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan. <ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan. - Intensitas komunikasi.

Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan implementor. <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan. - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program. b. Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan. c. Ketersediaan dana. <ul style="list-style-type: none"> - Dana yang dialokasikan. - Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan.
Disposisi	<p>Karakter pelaksana.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan standar maka semakin tinggi komitmennya. b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami. b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis, dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Sumber: Indiahono (2009)

Model konseptual dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan, sehingga dalam penelitian ini, model tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial

ekonomi masyarakat di sekitar kawasan di Desa Braja Harjosari Lampung Timur 2017.

(4). Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2008) ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih. Kedua variabel yang digunakan tersebut antara lain.

1. Isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi:

- a. kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (*interest affected*),
- b. tipe manfaat (*type of benefits*),
- c. derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envision*),
- d. letak pengambilan keputusan (*site of decision making*),
- e. pelaksana program (*program implementer*),
- f. sumber daya yang digunakan (*resources committed*).

2. Lingkungan kebijakan (*context of policy*) yang meliputi:

- a. kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*),

- b. karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristic*),
- c. tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Melalui pemaparan model-model implementasi di atas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh George C. Edward III, karena variabel-variabel yang digunakan dalam model implementasi kebijakan tersebut dapat membantu menjawab permasalahan peneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan di Desa Braja Harjosari Lampung Timur tahun 2017. Variabel-variabel tersebut yakni: (1) variabel komunikasi yang meliputi beberapa aplikasi konseptual yaitu implementor, kelompok sasaran, dan sosialisasi kebijakan; (2) variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (kemampuan implementor) dan sumber daya finansial (ketersediaan dana); (3) variabel disposisi yang menunjuk pada karakter pelaksana; dan (4) variabel struktur birokrasi yang meliputi ketersediaan SOP dan struktur organisasi.

Selain itu, alasan lainnya adalah karena model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh Edward III sebagai model implementasi kebijakan "*top-down approach*" (pendekatan dari atas

ke bawah), yang mana pendekatan implementasi kebijakan tersebut dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat yakni dimulai dari Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Taman Nasional, hingga sampai ke Taman Nasional. Oleh karena itu model tersebut sesuai dengan implementasi kebijakan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

b.Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D. L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999) dalam Pasolong (2010), setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi. Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi implementasi yaitu.

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu *assembling* produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain.

1. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan;
2. Kelemahan institusi;
3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif;
4. Kekurangan dalam bantuan teknis;
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
6. Pengaturan waktu;
7. Sistem informasi yang kurang mendukung;
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan
9. Dukungan yang berkesinambungan.

Menurut George C. Edward III dalam Winarno (2012), ada beberapa hambatan yang timbul dalam mengkomunikasikan perintah kebijakan. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh para pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan akan menimbulkan hambatan atau distorsi (kesalahpahaman) seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan dan perintah umum.

Kedua, informasi yang melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat

hierarkis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.

Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Menurut Turner dan Hulme (1997) dalam Pasolong (2010), hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas *input* yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

5. Tinjauan Tentang Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian

sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu "*oikos*" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "*nomos*" yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (KBBI). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini

masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (Koentjaraningrat, 1981).

a. Status Sosial

Menurut Mayor Polak (1979), status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek, pertama yaitu aspeknya yang kurang stabil, dan yang kedua yaitu aspek yang lebih dinamis. Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan fungsional. Pada aspek yang pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial yang berkaitan dengan status tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut Linton (2008), status sosial adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat dibanding dengan orang yang status sosialnya rendah. Menurut Soerjono Soekanto (Abdul Syani, 2007), status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang-orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat tertentu yang saling berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya di lingkungan pergaulannya.

Menurut Abdul Syani (2012), status sosial dapat dibedakan atas dua macam menurut proses perkembangannya, yaitu:

- 1). Status yang diperoleh atas dasar keturunan (*Ascribed Status*); pada umumnya status ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang menganut stratifikasi tertutup, misalnya masyarakat feodal atau masyarakat yang menganut paham rasialisme
- 2) Status yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja (*Achieved Status*); status ini dalam perolehannya berbeda dengan status atas dasar kelahiran, kodrat atau keturunan, status ini bersifat lebih terbuka, yaitu atas dasar cita-cita yang direncanakan dan diperhitungkan dengan matang. Individu dan segenap anggota masyarakat berhak dan bebas menentukan kehendaknya sendiri dalam memilih status tertentu sesuai dengan kemampuannya sendiri.

Mayor Polak membedakan lagi atas satu macam status, yaitu status yang diberikan (*Assigned Status*). Status ini sering mempunyai hubungan erat dengan *achieved status*, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggapnya

telah berjasa, telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa status sosial dibagi menjadi tiga yaitu status yang diperoleh atas dasar keturunan, status yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja, serta status yang diberikan oleh orang lain.

b. Status Ekonomi

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulannya. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok (Kartono, 2006). Status ekonomi adalah kedudukan yang dapat diukur berdasarkan pendapatan finansial yang diperoleh untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Seberapa tinggi kedudukan ekonomi seseorang dapat dilihat dari segi pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan atau penghasilan seseorang.

Pemilikan kekayaan atau fasilitas juga dapat menjadi aspek yang dapat menentukan tinggi rendahnya status ekonomi seseorang. Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang yang masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonomi. Menurut Abdul Syani (1994), bahwa pemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam

berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas, dan lainnya dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat.

Pekerjaan akan menentukan status ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan imbalan atau upah berupa barang dan jasa.

Dari pengetahuan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang yang dapat dinilai dari sudut pandang ekonominya. Sudut pandang ekonomi yang dimaksud adalah dari penghasilan dan kekayaan atau harta benda yang dimiliki seseorang.

c. Status Sosial Ekonomi

Menurut Soerjono Soekanto (1990), status sosial ekonomi adalah kedudukan sosial yang diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Status sosial ekonomi sebagai posisi yang ditempati individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum terjadi tentang pemilikan struktural, pendapatan efektif, pemilikan barang-barang dan

partisipasi dalam aktivitas kelompok dalam komunitasnya (Svalastoga, 2005).

Menurut Soerjono Soekanto (1982), status sosial ekonomi seseorang dapat diukur dari:

1). Ukuran kekayaan

Ukuran kekayaan merupakan harta benda atau materi yang dimiliki seseorang. Ukuran kekayaan tersebut dapat dilihat dari bentuk dan luas rumah yang bersangkutan, luas kepemilikan tanah, kepemilikan barang berharga dan fasilitas yang dimiliki.

2). Ukuran kekuasaan

Ukuran kekuasaan merupakan wewenang atau kewenangan seseorang yang dimilikinya karena kedudukan dalam masyarakat, lembaga atau suatu perusahaan yang dipimpimnya.

3). Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena pembawaan atau kedudukan atau hal yang dianggap oleh orang lain sesuatu yang terpendang. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada masyarakat.

4). Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang melalui proses belajar dalam suatu pendidikan baik formal maupun informal.

Menurut Friedman (1998), faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi, yaitu:

- 1). Pendidikan
- 2). Pekerjaan
- 3). Pendapatan atau penghasilan

Uraian berikut merupakan penjelasan dari faktor yang menentukan status sosial ekonomi, yaitu:

- 1). Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar di dalam membentuk tingkah laku seseorang, karena salah satu faktor yang penting dari usaha pendidikan adalah pembentukan watak seseorang dimana watak seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, biasanya memiliki intelektual yang lebih baik, dapat berpikir kritis, dan mampu memberikan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

- 2). Pekerjaan atau mata pencaharian

Pekerjaan merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, adanya pekerjaan maka seseorang akan mengharapkan mendapatkan penghasilan atau pendapatan sehingga imbalan dari kerja seseorang dan merupakan penghasilan keluarga

yang akan menghasilkan sejumlah barang yang dimilikinya. Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever (1982) mengemukakan bahwa pendapatan dari sektor formal, sektor informal, dan pendapatan dari sektor sub sistem.

3). Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang hasil sendiri yang dinilai dengan uang. Pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber. Tiap-tiap keluarga dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pendapatan yang sumbernya beda-beda dengan yang lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang menyebabkan tidak terhitungnya jumlah pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Dimana masing-masing pekerjaan memerlukan bakat, keahlian, atau kemampuan yang berbeda untuk mendudukinya. Distribusi pendapatan dalam suatu negara akan berpengaruh besar pada munculnya golongan-golongan berpenghasilan rendah, golongan berpenghasilan menengah, dan golongan berpenghasilan tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai status sosial ekonomi, peneliti akan menggunakan penggolongan status sosial ekonomi yang dikemukakan oleh Friedman sebagai aspek yang dapat mengukur status sosial ekonomi dalam penelitian ini.

6. Kajian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat (Pemberdayaan Masyarakat)

Menurut Nikijuluw (2001) program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, program yang berpangkal dan berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, program yang berasal dari bawah artinya masyarakatlah yang mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat.

Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang menekankan pada pemberdayaan maka diformulasikan sasaran pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas, sasaran khususnya menurut Nikijuluw (2001) antara lain :

- a. Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.
- c. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan individu.
- d. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumber daya lokal (*resource-based*), memiliki pasar yang jelas (*market-based*), dilakukan secara

berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya (*environmental-based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat lokal (*local societybased*) dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific-based*).

- e. Terciptanya hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.
- f. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam laut.

Maka berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat tersebut, pihak pengelola Taman Nasional Way Kambas telah mengeluarkan beberapa program yang mengikutsertakan masyarakat desa di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas, dan diharapkan melalui program dan implementasi kebijakan pengelolaan tersebut dapat memberikan pengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar kawasan, lebih khususnya yaitu kehidupan status sosial ekonomi.

7. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat

Sekitar Kawasan, maka dalam mengkaji fenomena tersebut peneliti menitikberatkan pada karya Max Weber yaitu tentang *Economy and Society*. Max Weber merupakan pemikir sosiologi klasik yang memberikan perhatian besar pada sistem ekonomi berdasarkan perspektif sosiologi. Jika pada bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* Weber memaparkan bagaimana agama Protestan mempengaruhi lahirnya sistem ekonomi kapitalis, maka pada *Economy and Society* Weber menekankan bagaimana tindakan sosial membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi (Madasari, 2012).

Max Weber mendefinisikan tindakan sosial (*social action*) sebagai tindakan individu yang memiliki subyektif bagi individu tersebut tetapi berdampak pada individu lain dan mengharapkan timbulnya reaksi dari individu lain tersebut. Weber mengungkapkan bahwa :

“Action insofar as the acting individual attaches a subjective meaning to his behavior ... Action is “sosial” insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of others and is there by oriented in its course. Social action, which includes both failure to act and passive acquiescence, may be oriented to the past, present, or expected future behavior of others.” (Weber, 1978).

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa tidak setiap aktivitas individu merupakan tindakan sosial. Aktivitas beribadah bukanlah sebuah tindakan sosial, hal ini dikarenakan aktivitas perseorangan tidak berhubungan dengan orang lain. Berbeda dengan aktivitas ekonomi, di mana setiap tindakan individu atau aktor selalu bersinggungan dengan individu lain dan menghadirkan reaksi atas tindakan tersebut (Weber, 1978).

Menurut Weber (1978) ada 4 tipe tindakan sosial yaitu :

- a. *Instrumentally rational*, yaitu tindakan sosial yang mengharapkan reaksi individu lain sesuai dengan kondisi atau tujuan aktor yang melakukan tindakan sosial tersebut.
- b. *Value rational*, yaitu tindakan sosial berdasarkan nilai agama atau etika yang dipegang.
- c. *Affectual*, yaitu tindakan sosial yang dipengaruhi oleh emosi dan perasaan aktor.
- d. *Traditional*, yaitu tindakan sosial yang dibentuk oleh kebiasaan.

Berdasarkan teori tindakan sosial ini, Max Weber mendefinisikan konsepnya tentang tindakan ekonomi (*economy action*). Menurut Weber, tindakan ekonomi merupakan tindakan sosial yang berorientasi pada ekonomi, yaitu upaya memenuhi kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya menguasai sumber daya ekonomi dan mencari keuntungan. Max Weber mengungkapkan bahwa:

“Economic action is any peaceful exercise of an actor’s control over resources which in its main impulse oriented towards economic ends.” (Waber, 1978).

Dapat peneliti simpulkan dari kerangka teori di atas bahwa jika dikaitkan dengan judul penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, implementasi teori tersebut terhadap penelitian ini ditunjukkan dengan adanya beberapa program pengelola Taman Nasional

Way Kambas terkait dengan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dengan kesejahteraan status sosial ekonominya. Beberapa program tersebut seperti mengikutsertakan masyarakat sekitar desa penyangga Taman Nasional Way Kambas dengan kegiatan yang ada di Taman Nasional Way Kambas, baik dari segi pariwisata, pendidikan, ekonomi, dan juga sosialnya. Artinya dengan adanya program tersebut pihak Taman Nasional Way Kambas memiliki kepedulian terhadap ekologi Way Kambas juga dengan tidak mengesampingkan peran serta masyarakat sekitar salah satunya dengan peningkata status sosial ekonomi masyarakat tersebut.

B. Kerangka Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan adalah :

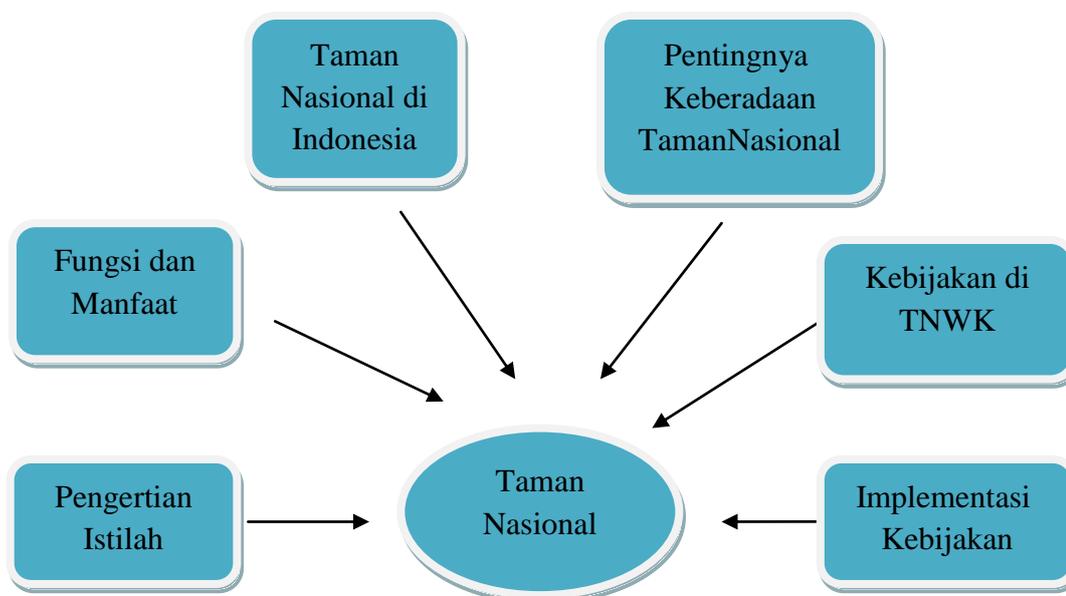
1. Ari Rakatama (2007), penelitian dengan judul Kontribusi Aktivitas Wisata Alam Di Taman Nasional Way Kambas Terhadap Perekonomian Setempat ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi aktivitas wisata alam di TNWK dalam membuka kesempatan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi curahan tenaga kerja masyarakat setempat pada aktivitas tersebut serta kontribusinya dalam menyerap hasil pertanian setempat. Penelitian ini dilaksanakan pada empat desa yang berbatasan langsung dengan TNWK di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur

pada bulan September dan Oktober 2006 melalui wawancara dengan responden terpilih. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dengan tabulasi yang disajikan secara deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis curahan tenaga kerja, regresi *linear* berganda, dan serapan pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) aktivitas wisata alam di TNWK memberikan kontribusi dalam membuka kesempatan kerja di sektor non-pertanian bagi masyarakat setempat, khususnya sebagai pedagang, pengojek, dan pemandu wisata dengan besaran rata-rata 21,74% dari hari kerja potensial, (2) faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi tingkat curahan tenaga kerja masyarakat pada aktivitas wisata alam di TNWK antara lain adalah tingkat upah pada aktivitas wisata alam di TNWK, tingkat upah pada sektor pertanian, luas lahan pertanian yang dimiliki, pendapatan dari sektor pertanian, jumlah anggota keluarga, dan akumulasi potensi upah yang hilang akibat menganggur, (3) aktivitas wisata alam di TNWK memberikan kontribusi dalam menyerap hasil pertanian masyarakat setempat, khususnya komoditi pisang, kacang tanah, jagung, dan ubi kayu dengan besaran rata-rata 4,11% dari tingkat penjualan total.

2. Winahyu Adyanandaputri (2015), penelitian dengan judul Analisis Alokasi Anggaran Dalam Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas ini bertujuan menganalisis mekanisme penyusunan anggaran, pencapaian kegiatan dan anggaran dalam pengelolaan TNWK, serta efektivitas anggaran TNWK. Hasil menunjukkan TNWK mendapat sumber

anggaran utama dari pemerintah serta dukungan dari beberapa mitra. Penyusunan anggaran dalam TNWK didominasi oleh kantor BTNWK, seksi dan resort masih belum banyak menganbil peran dalam mekanisme. Berdasarkan penilaian Skala Likert, pengelolaan TNWK dianggap hampir sesuai dengan prinsip manajemen yang baik. Kegiatan dan anggaran yang diterapkan mampu menekan masalah yang dalam Taman Nasional, namun masih kurang untuk memaksimalkan pengembangan. Anggaran TNWK lebih banyak digunakan untuk mendukung masalah administrasi seperti gaji pegawai. Pembagian anggaran berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pokok dalam efektivitas pengelolaan dan tercapainya tujuan TNWK.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.
Kerangka Berpikir tentang Taman Nasional (Sumber: Data Primer, 2017)

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Bab 1 pasal 1 ayat 14 mendefinisikan bahwa:

“Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.”

Merujuk pada definisi menurut Undang-Undang tersebut, terlihat bahwa kekayaan Indonesia yang berbentuk taman nasional sangat penting akan eksistensi keberadaannya, bukan hanya sebagai kawasan untuk melindungi ekosistem (flora dan fauna) namun juga salah satunya sebagai kawasan dengan tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia jumlah atau keberadaan taman nasional hingga 2016 tercatat ada 51 taman nasional yang tersebar dengan di dalamnya memiliki masing-masing keanekaragaman hayati yang di setiap tempatnya berbeda dengan yang lainnya. Suatu taman nasional dicirikan oleh keberadaannya sebagai kawasan konservasi untuk melindungi kawasan alami dan berpemandangan indah yang penting secara nasional ataupun internasional serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Kawasan alam ini relatif cukup luas dan materinya tidak diubah oleh kegiatan manusia serta pemanfaatan sumber daya. Secara terperinci, suatu taman nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) mempertahankan contoh ekosistem dalam kondisi alaminya;
- (2) mempertahankan keanekaragaman ekologi dan pengaturan lingkungan;

- (3) melestarikan sumber daya plasma nutfah;
- (4) menyediakan pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan;
- (5) melestarikan kondisi kawasan tangkap air;
- (6) mengendalikan erosi, sedimentasi dan melindungi investasi kawasan liar;
- (7) menyediakan pelayanan rekreasi an pariwisata;
- (8) melindungi keindahan alam dan tempat terbuka;
- (9) mendorong pemanfaatan rasional dan berkelanjutan dari kawasan marginal dan pembangunan.

Adapun peraturan atau aturan yang mengatur mengenai taman nasional dan kebijakan pengelolaannya terdapat diantaranya yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (penetapan Taman Nasional dan pengelolaan), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019. Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu taman nasional yang sangat kaya, baik dari segi keberagaman

jenis maupun dari segi estetika serta keunikannya. Oleh sebab itu, Taman Nasional Way Kambas mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan kehutanan di provinsi Lampung khususnya, maupun pembangunan secara nasional. Dalam era saat ini, pembangunan kehutanan telah memprioritaskan pembangunan di bidang konservasi. Hal ini sesuai dengan visi dan misi paradigma pembangunan kehutanan yang berorientasi pada:

- (1) keseimbangan aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan ekosistem;
- (2) pemanfaatan fungsi ganda (*multi purpose forest management/resources based management*);
- (3).meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*community based management*).

Dengan demikian pembangunan taman nasional sebagai salah satu kawasan konservasi diarahkan untuk meningkatkan peran kawasan dan sumber daya alam guna peningkatan masyarakat serta mutu kehidupan. Konsep pembangunan taman nasional ini merupakan pembangunan terpadu (*integrated conservation development program*) yang menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh komponen sumber daya alam dan ekosistemnya serta komponen masyarakat yang berada di sekitar guna memadukan aspek manfaat dan kepentingan taman nasional.

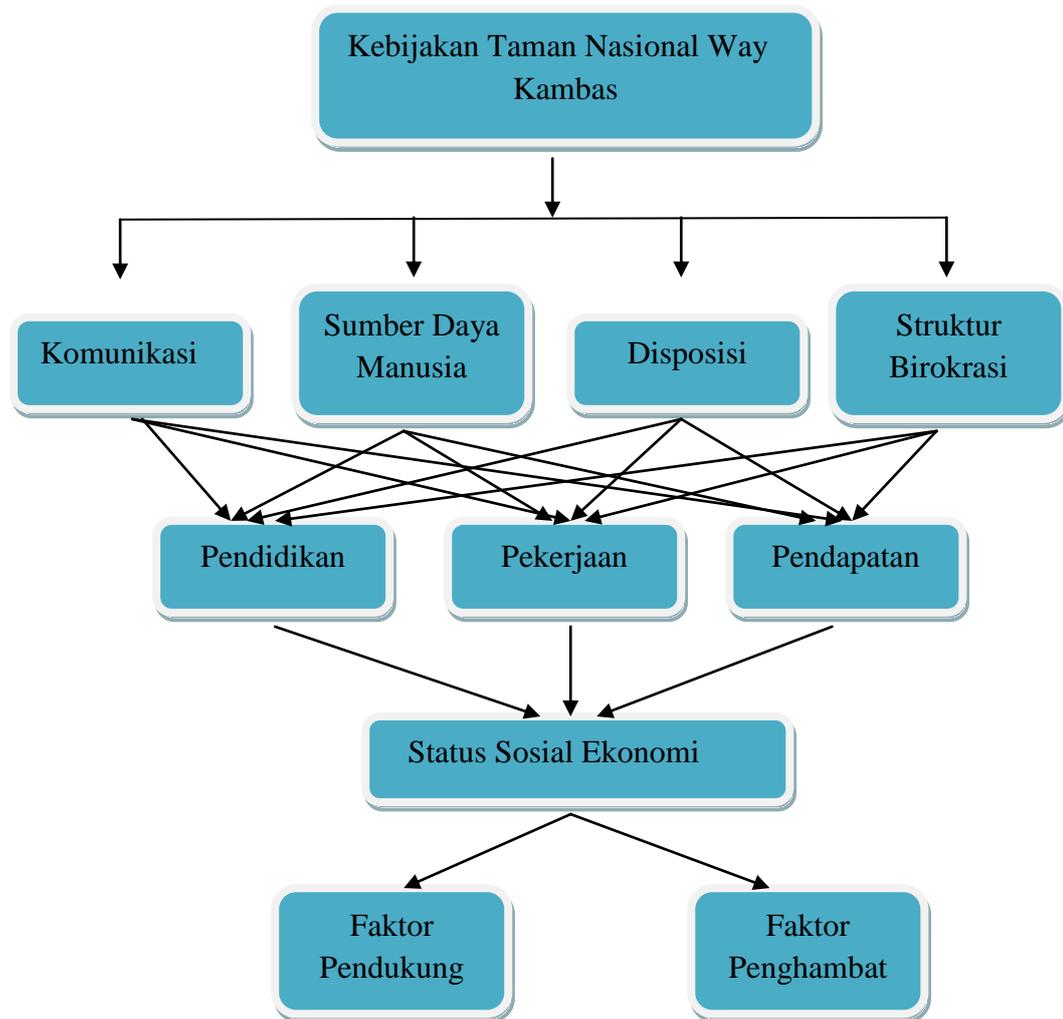
Adapun tujuan dari kebijakan pengelolaan taman nasional, yaitu:

- (1) pemantapan pengelolaan kawasan;

- (2) penanggulangan terhadap segala bentuk gangguan;
- (3) peningkatan profesionalisme dan peran masyarakat;
- (4) pemberdayaan potensi;
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain tujuan dari kebijakan pengelolaan, terdapat juga sasaran dari kebijakan pengelolaan yaitu:

- (1) mewujudkan dan menjamin keberadaan (eksistensi) sumber daya alam guna mendukung ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) melaksanakan pengelolaan sumber daya alam sesuai asas kelestarian dan optimalisme sumber daya manusia serta menjamin terbukanya peran serta masyarakat;
- (3) mencegah terjadinya degradasi fungsi dan komponen lingkungan serta menjamin distribusi manfaat sumber daya alam yang adil dan merata.



Gambar 3. Kerangka Berpikir tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan (Sumber: Data Primer, 2017)

Dari gambar kerangka berpikir di atas, peneliti dapat menjabarkannya. Suatu kebijakan ataupun program yang sudah ada di Taman Nasional Way Kambas diimplementasikan atau dilaksanakan sebagaimana aturan yang sudah ada, disini peneliti menggunakan indikator model menurut Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya melalui indikator tersebut peneliti mengkaitkannya dengan

indikator status sosial ekonomi masyarakat, yaitu dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Selanjutnya dalam penelitian ini, status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan tersebut meliputi apasaja faktor yang mendukung dan menghambat dari sebuah implementasi atau suatu program kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas berjalan yang berpengaruh terhadap kehidupan status sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Program atau kebijakan pengelolaan yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas pada saat ini meliputi:

1. program pemantapan status kawasan, upaya ini bertujuan memantapkan keberadaan suatu taman nasional secara jelas baik dari segi hukum maupun fisik kawasannya;
2. program penataan kawasan, sesuai dengan tujuan dan konsepsi pengelolaan taman nasional, dilakukan penataan kawasan. Penataan kawasan ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan ruang dengan mempertimbangkan faktor potensi dan fungsi. Bentuk penataan kawasan ini berupa pembagian zonasi di taman nasional;
3. program pemantapan pengelolaan, kinerja yang baik dalam suatu pengelolaan kawasan merupakan tuntutan jaman, terutama dalam menyongsong era globalisasi yang sedang dialami saat ini. Untuk maksud tersebut pemantapan pengelolaan melalui profesionalisme sumber daya manusianya perlu didukung pula baik perangkat lunak maupun perangkat

kerasnya. Lebih lanjut perencanaan yang baik merupakan kunci utama dalam upaya pematapan pengelolaan;

4. program pembinaan potensi; dalam upaya optimalisasi fungsi, pembinaan potensi sangat diperlukan baik kegiatan yang menyangkut survey dan identifikasi maupun perlindungan jenis dan ekosistem serta pembinaan rehabilitasinya. Dengan demikian peranan potensi yang ada dapat tetap terjaga dan berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Di samping potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, potensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar kawasan merupakan salah satu program dalam upaya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen masyarakat disini merupakan salah satu aspek yang dibina sesuai konsep pembangunan yang menyeluruh dan terpadu;
5. program pengembangan potensi, dalam upaya mendukung pelestarian secara optimal fungsi kawasan serta manfaatnya pengembangan potensi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu program prioritas, sehingga manfaat baik langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan dan diakses masyarakat luas. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat serta memotivasi kepeduliannya terhadap sumber daya alam dan eksistensinya di samping pengembangan potensi sosial ekonomi dan budaya yang ada. Adapun pengembangan potensi ini mencakup kegiatan seperti pengembangan wisata alam, pengembangan daerah penyangga, pengembangan adat dan budaya, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan;

6. program pemberdayaan masyarakat, kemitraan merupakan salah satu kunci dalam pengelolaan taman nasional, oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan guna mendukung kerjasama dalam berbagai kegiatan yang ada. Pemantapan kelembagaan serta pelatihan merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat di samping akses termasuk informasi yang diperlukan;
7. program pemantapan pengamanan hutan, dalam upaya pengamanan hutan ditekankan pada kesadaran masyarakat melalui tindakan preventif seperti kegiatan penyuluhan, patroli wilayah, pelatihan serta koordinasi dengan seluruh instansi terkait serta masyarakat di sekitar kawasan. Tindakan represif dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang telah ditetapkan secara lugas, tegas, dan transparan. Pemantapan pengamanan hutan dilakukan pula dengan meningkatkan kemampuan personil polisi hutan terkait dengan hal tersebut maka upaya pemantapan sarana dan prasarana sebagai dukungan operasional telah diprioritaskan; dan
8. program monitoring dan evaluasi, dalam suatu pengelolaan diperlukan monitoring dan evaluasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam upaya pengelolaan taman nasional.

Selanjutnya dari program tersebut, peneliti mengambil model kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari model tersebut, atau dari keempat indikator menurut model kebijakan Edward III peneliti melihat bagaimana hubungannya dengan status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan,

dimana status sosial ekonomi tersebut terdiri dari aspek pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Setelah itu peneliti mengerucutkan menjadi status sosial ekonomi yang dilihat dari faktor pendukung maupun faktor penghambatnya.

Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini mempelajari bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, peneliti melihat sejauh apa dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional di lampang, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari implementasi tersebut (baik dampak positif maupun negatif), bagaimana dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan di lapangan, dan terakhir bagaimana solusi untuk menyelesaikannya.

D. Hipotesis

Hipotesis yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

H_0 = Tidak ada pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

H_a = Ada pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatori. Pendekatan kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis dalam rangka mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis yang ada (Solimun, 2001).

Muhammad Nazir (1988) mengemukakan bahwa tipe penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Sedangkan menurut Umar (1999) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengklarifikasikan

mengapa dan bagaimana adanya hubungan di antara dua aspek dan dua fenomena yang dilakukan untuk mencari jawaban atas teori yang sudah ada. Adapun latar belakang atau alasan dipilihnya metode kuantitatif tipe eksplanatori dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan lebih mendalam bagaimana pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel sebagai berikut :

1. Variabel *Independent* (X)

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel *independent* atau variabel bebas adalah implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas. Variabel implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas pada penelitian ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Taman Nasional Way Kambas dan diimplementasikan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

2. Variabel *Dependent* (Y)

Yaitu variabel yang tergantung pada variabel lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel *dependent* atau variabel terikat adalah status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Kondisi status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas merupakan keadaan yang menggambarkan bagaimana status sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kondisi masyarakat tersebut dapat diketahui berdasarkan keadaan sebelum dan sesudah dari adanya implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas.

C. Definisi Operasional

1. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan kajian dari studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006) dalam Pasolong (2010) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Masih dalam Pasolong (2010), Hinggis (1985) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Lebih lanjut Gordon (1986) dalam

Pasolong (2010) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Seperti pendapat Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, atau jenis keluaran yang nyata. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Sedangkan kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai obyek kebijakan.

Implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Output* biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcome* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya *output* kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah keluarnya *outcome* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi. Implementasi kebijakan merupakan

sesuatu yang krusial dalam studi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Islamy (2001) dalam jurnal ilmiah *Administrasi Publik* (2006) bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya merupakan kerja sama antara birokrasi (*state*), pasar (*market*), dan komunitas (*civil society*). Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan

oleh Lester dan Stewart Jr. (2000) dalam Agustino (2008) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses atau suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Hal ini jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Merrile Grindle (1980) masih dalam Agustino (2008) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

2. Status Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (1990), status sosial ekonomi adalah kedudukan sosial yang diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Status sosial ekonomi sebagai posisi yang ditempati individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum terjadi tentang pemilikan struktural, pendapatan efektif, pemilikan barang-barang dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dalam komunitasnya (Svalastoga, 2005).

Menurut Soerjono Soekanto (1982), status sosial ekonomi seseorang dapat diukur dari:

1). Ukuran kekayaan

Ukuran kekayaan merupakan harta benda atau materi yang dimiliki seseorang. Ukuran kekayaan tersebut dapat dilihat dari bentuk dan luas rumah yang bersangkutan, luas kepemilikan tanah, kepemilikan barang berharga dan fasilitas yang dimiliki.

2). Ukuran kekuasaan

Ukuran kekuasaan merupakan wewenang atau kewenangan seseorang yang dimilikinya karena kedudukan dalam masyarakat, lembaga atau suatu perusahaan yang dipimpimnya.

3). Ukuran kehormatan

Ukuran kehormatan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena pembawaan atau kedudukan atau hal yang dianggap oleh orang lain sesuatu yang terpandang. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa pada masyarakat.

4). Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang melalui proses belajar dalam suatu pendidikan baik formal maupun informal.

Menurut Friedman (1998), faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi, yaitu:

- 1). Pendidikan
- 2). Pekerjaan
- 3). Pendapatan atau penghasilan

Uraian berikut merupakan penjelasan dari faktor yang menentukan status sosial ekonomi, yaitu:

1). Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar di dalam membentuk tingkah laku seseorang, karena salah satu faktor yang penting dari usaha pendidikan adalah pembentukan watak seseorang dimana watak seseorang akan berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, biasanya memiliki intelektual yang lebih baik, dapat berpikir kritis, dan mampu memberikan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2). Pekerjaan atau mata pencaharian

Pekerjaan merupakan suatu unit kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat untuk menghasilkan barang atau

jasa. Pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, adanya pekerjaan maka seseorang akan mengharapkan mendapatkan penghasilan atau pendapatan sehingga imbalan dari kerja seseorang dan merupakan penghasilan keluarga yang akan menghasilkan sejumlah barang yang dimilikinya. Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Ever (1982) mengemukakan bahwa pendapatan dari sektor formal, sektor informal, dan pendapatan dari sektor sub sistem.

3). Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang hasil sendiri yang dinilai dengan uang. Pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat diperoleh dari bermacam-macam sumber. Tiap-tiap keluarga dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pendapatan yang sumbernya beda-beda dengan yang lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang menyebabkan tidak terhitungnya jumlah pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Dimana masing-masing pekerjaan memerlukan bakat, keahlian, atau kemampuan yang berbeda untuk mendudukinya. Distribusi pendapatan dalam suatu negara akan berpengaruh besar pada munculnya golongan-golongan berpenghasilan rendah, golongan berpenghasilan menengah, dan golongan berpenghasilan tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai status sosial ekonomi, peneliti akan menggunakan penggolongan status sosial ekonomi yang dikemukakan

oleh Friedman sebagai aspek yang dapat mengukur status sosial ekonomi dalam penelitian ini.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas (<i>Independent</i>) (Variabel X)	Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Sumber Daya Manusia • Disposisi • Struktur Birokrasi
Status Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan (<i>Dependent</i>) (Variabel Y)	Status sosial ekonomi adalah kedudukan sosial yang diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Pekerjaan • Pendapatan

Sumber: Data Primer, 2017

D. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dalam buku Moleong (2011) menyatakan, cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori, substantif, dan melihat di

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kawasan Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur dan masyarakat sekitar kawasan, tepatnya di Desa Braja Harjosari, Lampung Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan fokus penelitian serta lokasi yang berdekatan dengan tempat peneliti.

E. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang akan diteliti. Unit analisis yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini adalah rumah tangga atau keluarga yang dikepalai oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang tersebar di 8 dusun di Desa Braja Harjosari, Lampung Timur.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Braja Harjosari yang berjumlah 1542 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1439 KK laki-laki, dan 103 KK perempuan. Jumlah populasi tersebut tersebar di 8 Dusun di Desa Braja Harjosari, Lampung Timur.

2. Sampel

a. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*, yaitu teknik yang dalam pengambilan sampelnya menggabungkan subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dalam populasi dianggap sama. Adapun caranya adalah dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat yang ada di Desa Braja Harjosari, Lampung Timur.

b. Teknik Penentuan Jumlah Sampel

Menurut Setyorini (2007) untuk mengetahui jumlah sampel representatif dapat menggunakan rumus Slovin, yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Besarnya sampel

N = Banyaknya populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus Slovin, dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari jumlah populasi yang ada di Desa Braja Harjosari, Lampung Timur, dengan mengambil batas toleransi kesalahan (e) = 10%, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1542}{1 + 1542(0,10)^2}$$

$$n = \frac{1542}{1 + 15,42}$$

$$n = \frac{1542}{16,42}$$

$$n = 93,909$$

$$n = 94$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 94 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada masyarakat di Desa Braja Harjosari.terkait mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

2. Angket

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Braja Harjosari terkait mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

3. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi data kuesioner yang dimungkinkan memerlukan penjelasan-penjelasan terkait dengan hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden.

4. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis dalam melihat dan membahas kenyataan yang ditemukan dalam penelitian lapangan serta untuk mempertanggung jawabkan analisa dan pembahasan masalah.

H. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 21.0 yang meliputi :

1. Pengeditan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan

(*interpolasi*) data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.

2. Memasukkan Data (*Input Data*)

Merupakan tahap memasukkan data yang telah di *edit* ke dalam *software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data.

3. Pengolahan (*Processing*)

Setelah data dimasukkan ke dalam *software* SPSS 21.0, kemudian dilakukan proses pengolahan dengan menggunakan uji statistik regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

4. Hasil (*Output*)

Merupakan hasil yang diperoleh dari proses pengolahan data untuk selanjutnya diinterpretasikan.

I. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik analisis regresi linear sederhana, uji F (Ftest) dan koefisien determinasi (R^2). Namun, sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dengan interpretasi sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linear sederhana, uji F (Ftest) dan koefisien determinasi (R^2) terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi dasar yang terdiri dari uji normalitas data, uji linearitas data dan uji homogenitas data.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data yang akan dilakukan pengujian berdistribusi normal atau tidak. Adapun untuk melakukan pengujian normalitas data dalam penelitian ini digunakan aplikasi SPSS versi 21.0 dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Z*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui uji normalitas data adalah :

- 1) Klik menu *Analyze – Regression – Linear*
- 2) Masukkan variabel X ke kolom *Independent List* dan variabel Y ke kolom *Dependent List*, kemudian klik *save*.
- 3) Kemudian pada bagian *Residuals* centang *Unstandardized - Continue – OK*.
- 4) Selanjutnya pilih menu *Analyze – Non Parametric Test – Legacy Dialog – 1 Sample Ks*.
- 5) Masukkan variabel *Unstandardized Residuals* ke dalam kota *Test Variable List*, kemudian pada *Test Distribution* centang kolom normal.
- 6) Klik OK.

b. Uji Linearitas Data

Uji linieritas data bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor (X) dengan variabel kriterium (Y). Uji linearitas dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Adapun nilai F_{hitung} didapatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Klik menu *Analyze-Compre Means-Means*.
- 2) Kemudian masukkan variabel X ke kolom *Independent List* dan variabel Y ke kolom *Dependent List*.

- 3) Selanjutnya klik *option* pada *Statistic For First Layer* pilih *Test Of Linearity*.
- 4) Selanjutnya pilih *continue* dan klik OK.

c. Uji Homogenitas Data

Uji homogenitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji homogenitas data adalah :

- 1) Buka file yang akan dianalisis.
- 2) Pilih menu *Analyze-Compare Means-One Way Anova*.
- 3) Kemudian masukkan variabel Y ke kolom *Dependent List* dan variabel X ke kolom *factor* lalu klik *options*.
- 4) Pada menu *options* beri tanda pada *Homogeneity Of Variance* lalu klik *continue* dan OK.

2. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana, uji F (F-test) dan koefisien determinasi (R^2).

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua variabel serta mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependent (variabel Y), nilai variabel *dependent* berdasarkan nilai *independent* (variabel X) yang diketahui. Selain itu, dapat digunakan juga untuk mengetahui perubahan pengaruh yang akan terjadi berdasarkan pengaruh yang ada pada periode sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang diperkirakan antara program atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan dilakukan dengan rumus analisis regresi linear sederhana, yaitu:

$$Y = a + bX$$

Sumber: Sugiyono (2014).

Keterangan:

Y = Subjek variabel terikat yang diprediksi (status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas, disini yang dimaksud adalah masyarakat Desa Braja Harjosari)

X = Subjek variabel bebas yang memiliki nilai tertentu (implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas).

a = Bilangan konstanta regresi untuk $X = 0$ (nilai y pada saat x nol).

b = Koefisien arah regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel Y bila bertambah atau berkurang 1 unit.

Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai a dan b dapat diketahui dengan menggunakan bantuan Software SPSS versi 21.0 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Buka data hasil *compute* (hasil penyekoran) variabel X dan Y.
- b) Kemudian klik *analyze – regression – linear* .
- c) Masukkan variabel X ke kolom independent list dan variabel Y ke kolom dependent list, selanjutnya pada method pilih metode enter.
- d) Klik *statistics*, lalu beri tanda pada *estimates* dan *model fit*, klik *continue*.
- e) Klik OK.

Nilai a dapat diketahui dengan melihat tabel *coefficients* pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B. Setelah melakukan pengolahan data dengan SPSS versi 21.0 dan telah diketahui nilai a dan b , kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi sederhana untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang diketahui. Persamaan regresi tersebut bermanfaat untuk meramalkan rata-rata variabel Y bila variabel X diketahui dan memperkirakan rata-rata perubahan variabel Y untuk setiap perubahan X.

b. Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk memprediksi apakah model regresi dapat dipakai untuk memprediksi status sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas. Uji F (Ftest) dalam penelitian ini menggunakan *software SPSS Versi 21.0 for windows* dan datanya bersumber pada output tabel Anova, kemudian pengujian dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan langkahlangkah sebagai berikut :

a. Merumuskan Hipotesis

H_0 = Tidak ada pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

H_a = Ada pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

b. Menentukan F_{hitung} dan signifikansi.

Berdasarkan tabel Anova dapat dilihat hasil perolehan F_{hitung} dan signifikansinya.

c. Menentukan F_{tabel} .

F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df_1 (jumlah variabel bebas) = 1, dan df_2 (n-k-1). n adalah jumlah sampel data dan k adalah jumlah variabel independen.

d. Kriteria Pengujian

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Begitupun sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

e. Membuat Kesimpulan

Membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dan kesimpulan diperoleh dari kriteria pengujian. Jika H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas tidak memiliki pengaruh terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, sebaliknya jika H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas memiliki pengaruh terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Adapun besarnya R^2 yaitu antara $0 < R^2 < 1$. Artinya jika R^2 semakin mendekati satu maka kekuatan hubungannya dikatakan kuat karena semakin tinggi variasi variabel *dependent* yang dijelaskan oleh variabel *independent*. Berikut tabel koefisien korelasi antara variabel *independent* implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas (X) terhadap variabel

dependent status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan (Y). Menurut Sugiyono (2014) untuk mengetahui besaran interpretasi koefisien korelasi dapat mengacu pada pedoman berikut ini:

Tabel 3. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Nilai Korelasi (r)	Interpretasi Korelasi
0,00 sampai 0,199	Sangat lemah
0,20 sampai 0,399	Lemah
0,40 sampai 0,599	Sedang
0,60 sampai 0,799	Kuat
0,80 sampai 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, 2014.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini dideskripsikan profil Taman Nasional Way Kambas yang meliputi sejarah singkat berdirinya Taman Nasional Way Kambas, kondisi geografis dan potensi Taman Nasional Way Kambas. Pada bagian ini juga diuraikan gambaran mengenai daerah penyangga atau desa penyangga Taman Nasional Way Kambas, yaitu Desa Braja Harjosari. Desa ini menjadi salah satu desa yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas yang dijadikan sebagai sampel untuk mengukur status sosial ekonomi masyarakat dari adanya implementasi kebijakan pengelolaan yang diterapkan oleh Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur.

A. Gambaran Umum tentang Taman Nasional Way Kambas

1. Sejarah Singkat Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah salah satu dari dua kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999, kawasan TNWK mempunyai luas lebih kurang

130.000 ha . Secara geografis, TNWK terletak antara $40^{\circ}37'$ - $50^{\circ}16'$ Lintang Selatan dan antara $105^{\circ}33'$ - $105^{\circ}54'$ Bujur Timur. Berada di bagian Tenggara Pulau Sumatera di wilayah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

Pada tahun 1924 kawasan hutan Way Kambas dan Cabang disisihkan sebagai daerah hutan lindung, bersama-sama dengan beberapa daerah hutan yang tergabung di dalamnya. Pendirian kawasan pelestarian alam Way Kambas dimulai sejak tahun 1936 oleh Residen Lampung, Mr. Rookmaker, dan disusul dengan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1937. Pada 1978, Suaka Margasatwa Way Kambas diubah menjadi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tanggal 10 Juli 1978 dan dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam (SBKPA). Kawasan Pelestarian Alam diubah kembali menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) yang dikelola SBKSDA dengan luas 130.000 ha pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/1985 tanggal 12 Oktober 1985. Pada tanggal 1 April 1989 bertepatan dengan Pekan Konservasi Nasional di Kaliurang Yogyakarta, dideklarasikan sebagai Kawasan Taman Nasional Way Kambas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989 dengan luas 130.000 ha. Kemudian pada 1991 atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/Kpts-II/1991 tanggal 13

Maret 1991 dinyatakan sebagai Taman Nasional Way Kambas, dimana pengelolaannya oleh Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas yang bertanggungjawab langsung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjung Karang. Dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 tanggal 13 Maret 1997 dimana Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Way Kambas dinyatakan sebagai Balai Taman Nasional Way Kambas.

Alasan ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan pelestarian alam adalah untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai satwa liar, diantaranya adalah Tapir (*Tapirus indicus*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), berbagai jenis primata, Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*). Namun demikian,. Setelah ditetapkannya sebagai kawasan suaka margasatwa hampir selama dua puluh tahun, terutama pada periode 1968-1974, kawasan ini mengalami kerusakan habitat cukup berat, yaitu ketika kawasan ini dibuka untuk Hak Pengusahaan Hutan, kawasan ini beserta segala isinya termasuk satwa banyak mengalami kerusakan. Dari jenis satwa tersebut, sampai dengan saat ini keberadaannya masih terjaga dengan baik, antara lain yang dikenal dengan *The Big Five Mammals* yaitu Tapir (*Tapirus indicus*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*) dan Badak Sumatera (*Diserohinus sumatranus*).

2. Hidrologi Kawasan Taman Nasional Way Kambas

Dalam pengelolaan daerah aliran sungai, kawasan Taman Nasional Way Kambas termasuk ke dalam dua kelompok daerah Aliran sungai (DAS) yaitu DAS Abar-Kambas dan DAS Way Seputih. Sungai-sungai yang terdapat di dalam kawasan dan sekitarnya umumnya beraliran lambat dan bentuk *meander*, hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan ketinggian antara muka laut dengan daratan yang cukup rendah. Sebagaimana daerah-daerah lain di wilayah sepanjang Pantai Timur Pulau Sumatera, kawasan ini juga banyak terdapat rawa-rawa. Berdasarkan analisa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menggunakan *citra landsat*, diketahui bahwa badan air (sungai, rawa-rawa yang secara rutin tergenang air) yang berada di Taman Nasional Way Kambas memiliki luas 4500 ha.

Secara garis besar, Taman Nasional Way Kambas memiliki 3 (tiga) sub kelompok aliran sungai yang relatif besar dengan bermuara di Pantai Laut Jawa yang berada di bagian Timur kawasan.

- a. Bagian Selatan, terdapat kelompok sungai atau anak sungai dalam kawasan yang arah aliran airnya bergabung dengan Sungai Penet. Di samping itu, sungai tersebut juga menjadi muara bagi sungai kecil yang berasal dari luar kawasan sehingga secara umum kondisi airnya keruh. Sungai Penet atau disebut dengan Way Penet merupakan batas alam sebelah Selatan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

- b. Bagian Tengah, pada bagian ini sungai utamanya adalah Way Kanan dan Wako. Beberapa cabang sungai yang bergabung dengan sungai Way Kanan antara lain Way Negara Batin dan Way Areng. Kondisi airnya cukup jernih, hal tersebut dimungkinkan karena sebagian besar hulunya berasal dari kawasan hutan yang rendah erosi dan relatif tidak tercemar.
- c. Bagian Utara, pada bagian ini terdapat kelompok sungai yang alirannya bergabung dengan Sungai Pegadungan yang bermuara di cabang yang berada di sebelah Utara kawasan. Sungai Pegadungan adalah sungai terpanjang yang berbatasan dengan wilayah Taman Nasional Way Kambas. Kondisi aliran sungai ini cukup keruh karena airnya sebagian berasal dari daerah luar yang mempunyai tingkat erosi relatif lebih tinggi.

3. Topografi Kawasan Taman Nasional Way Kambas

Pada umumnya kondisi topografi Taman Nasional Way Kambas relatif datar sampai dengan sedikit bergelombang. Topografi bergelombang tersebut terdapat di bagian Barat kawasan, dengan ketinggian sampai dengan 50 mdpl. Lokasi yang mempunyai ketinggian 50 meter di atas permukaan laut adalah sekitar Kecamatan Purbolinggo. Pada bagian Utara kawasan merupakan daerah lembah yang terpotong oleh sungai-sungai yang menyebabkan terbentuknya topografi bergelombang. Hal tersebut cukup berbeda dengan wilayah Timur yang landai.

Studi lahan dan tanah Taman Nasional Way Kambas dalam skala yang lebih lengkap diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Tanah, Departemen Pertanian, Jakarta. Pada Peta Satuan Tanah dan Lahan lembar Tanjung Karang yang meliputi wilayah Taman Nasional Way Kambas bagian Selatan mulai dari garis koordinat 5° Lintang Selatan arah Selatan dan Peta Satuan Tanah dan Lahan lembar Menggala yang meliputi wilayah Taman Nasional Way Kambas mulai dari posisi lintang 5° Lintang Selatan arah Utara. Berdasarkan peta tersebut, bahwa satuan lahan Taman Nasional Way Kambas terdiri dari grup *alluvial*, grup *marin*, grup dataran *tuf masam*.

a. Grup *alluvial* (A)

Alluvial yaitu tanah yang terbentuk dari bahan endapan sungai, endapan rawa, dan endapan hasil *aluviasi* atau *koluviasi* di kaki lereng perbukitan atau pegunungan yang landai. Tingkat kesuburan tanahnya sangat tergantung dengan bahan di daerah sekitarnya dan daerah dari mana bahan itu berasal. Umumnya unsur hara di daerah sedang sampai sangat rendah, dimana lapisan atas lebih baik daripada lapisan bawah.

b. Grup *marine* (B)

Merupakan dataran rendah disepanjang Pantai Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang atau sejajar Pantai Timur lembar peta yang sebagian besar daerahnya dipengaruhi pasang surut. Terletak pada ketinggian 0-25 mdpl, berupa dataran pasang surut berlumpur yang diselingi oleh pasir pantai dan cekungan-cekungan.

Bentuk wilayahnya datar, datar agak cekung, sedang berpasir. Namun pada umumnya datar agak cembung dengan lereng 0-3%. Vegetasi utamanya berupa hutan mangrove dan juga rawa pasang surut.

c. Grup dataran *tuf masam*

Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran *tuf masam* dan daerah perbukitan atau pegunungan. Bahan pembentuknya berupa batuan intrusi masam terutama granit dan batuan metamorfik. Jenis tanah utama yang dijumpai di daerah ini adalah *Kanhapludults*, *Dystropepts*, *hapludults*, dan *Tropaquepts*.

4. Iklim, Suhu, dan Kelembaban Taman Nasional Way Kambas

a. Iklim

Besarnya curah hujan di musim kemarau dari April sampai dengan Oktober sangat bervariasi, sedangkan di musim penghujan hanya sedikit variasinya. Selama musim kemarau, seluruh kawasan menerima curah hujan rata-rata sekitar 2000 mm per tahun, yang berarti sedikit di bawah rata-rata curah hujan di kawasan pegunungan Sumatera yang berkisar antara 4.500-5.000 mm per tahun. Pada periode sepuluh tahunan, antara 1975-1984 menunjukkan rata-rata curah hujan adalah 2.496 mm per tahun. Curah hujan maksimum adalah 3.448 mm dan minimum adalah 1.548 mm pada 1977. Rata-rata dalam satu periode, musim kemarau dalam satu tahun adalah 3

bulan, sedangkan musim penghujan adalah 8 bulan. Bulan Agustus dan September adalah musim kemarau relatif panas dibanding bulan lainnya. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Feguson, kawasan Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya termasuk dalam tipe iklim B, dengan musim kemarau secara umum berlangsung selama dua bulan (dapat berlangsung sampai enam bulan, yang terjadi sekali dalam dua puluh tahun).

b. Suhu dan Kelembaban

Suhu dan kelembaban dalam kawasan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada tipe vegetasi. Di daerah hutan primer atau lebat, hanya terdapat sedikit variasi baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Namun pada kawasan terbuka seperti alang-alang dan hutan sekunder, terjadi variasi yang cukup tinggi. Demikian juga untuk variasi suhu hariannya. Pada siang hari suhu relatif lebih tinggi dibandingkan di malam hari. Suhu yang tinggi ini menyebabkan vegetasi alang-alang cepat berkurang kandungan airnya sehingga mudah sekali terbakar. Suhu yang tinggi menyebabkan tanah mudah sekali kehilangan air akibat evaporasi langsung.

5. Ekosistem Kawasan Taman Nasional Way Kambas

Berada pada ketinggian antara 0-50 mdpl dengan topografi datar sampai dengan landai bergelombang, kawasan ini mempunyai 4 (empat) tipe ekosistem utama, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan rawa, ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai. Ciri utama dari keberadaan ekosistem tersebut ditandai dengan formasi vegetasinya. Selain itu terdapat juga tipe-tipe ekosistem peralihan seperti ekosistem riparian. Ekosistem tersebut terbentuk dikarenakan terjadinya perubahan dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya. Sebagai contoh adalah formasi vegetasi dari daerah darat ke air.

Ekosistem hutan hujan dataran rendah mendominasi di daerah sebelah Barat kawasan. Daerah ini terletak pada daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jenis yang mendominasi adalah meranti (*Shorea sp*), rengas (*Gluta renghas*), keruing (*Dipterocarpus sp*), puspa (*Schima walichi*), dan masih banyak lagi. Ekosistem tersebut rata-rata mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dengan stratum tajuk yang lengkap, sehingga jenis flora dan faunanya cukup beragam.

Sedangkan hutan rawa terutama menempati pada daerah sekitar sungai terutama terletak di wilayah Timur kawasan. Ekosistem tersebut terbentuk karena adanya daerah atau wilayah yang tergenang air tawar relatif lama

yang dikarenakan wilayah tersebut lebih rendah dari wilayah sekitarnya. Jenis tanah tersebut mempunyai tingkat keasaman yang cukup tinggi, proses dekomposisi relatif lama. Tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Satwa jenis burung lebih suka pada ekosistem hutan rawa. Jenis dominan untuk hutan rawa antara lain kantung semar (*Nepenthes*), tanaman palm merah, pandan dan nibung. Salah satu ciri utama vegetasi rawa mempunyai akar lutut dan tunggang.

Ekosistem hutan mangrove atau payau terletak di sekitar pantai, dimana terdapat pergantian atau salinasi antara air asin dan air tawar secara teratur. Umumnya terletak di sepanjang Pantai Timur kawasan Taman Nasional Way Kambas. Ekosistem ini mempunyai peran atau manfaat nyata dalam mendukung sumber kehidupan manusia, juga sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya bagi jenis-jenis ikan dan udang. Sehingga menjaga tingkat ketersediaan suplai ikan dan biota lainnya. Di sekitar Pantai Taman Nasional Way Kambas telah berdiri ratusan bagan yang dipergunakan untuk menangkap cumi, udang, serta hasil lainnya/ pemasangan jaring untuk menangkap di sekita pantai pun dilakukan, hal ini merupakan tanda bahwa dengan adanya Taman Nasional Way Kambas memberikan lingkungan yang baik sehingga biota laut dapat hidup dengan baik.

Ekosistem hutan pantai atau lebih dikenal pantai saja ini dicirikan dengan kondisi lingkungan yang terletak di dekat laut namun tidak mendapat

genangan baik air laut dan tawar. Dengan jenis tanah biasanya didominasi oleh pasir. Ekosistem hutan pantai ini khususnya terletak di sepanjang Pantai Timur Taman Nasional Way Kambas. Salah satu cirinya antara lain adanya ketapang (*Terminalia cattapa*), dan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*).

Ekosistem riparian bukan ekosistem lazim yang telah dikenal selama ini. Ekosistem ini berada pada zona peralihan antara air dan darat, sehingga belum dikategorikan ke dalam ekosistem yang ada. Dengan semakin luasnya wilayah atau badan air persatuan tempat, maka kemungkinan semakin besar ekosistem tersebut. Beberapa jenis yang biasa terdapat pada zona peralihan antara lain putat, dan beberapa jenis tanaman merambat atau liana.

Keanekaragaman ekosistem yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas sangat tinggi. Begitu pula dengan keanekaragaman fauna. Fauna yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas dapat dikategorikan menjadi berikut.

a. Mamalia

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatraensis*) dengan populasi berkisar 180-200 ekor, Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*) dengan populasi berkisar 20-25 ekor, Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa (*Cervus unicolor*), Kijang (*Muntiacus muntjac*), Napu (*Tragulus napu*), Babi Hutan (*Sus scrofa*). Selain itu terdapat jenis mamalia

lainnya, diantaranya Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dengan jumlah populasi 30-40 ekor.

b. Primata

Terdapat 6 (enam) jenis primata yaitu Siamang (*Symphalangus syndactyllus*), Owa (*Hylobates moloch*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung (*Presbytis cristata*), dan Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*). Jenis primata ini sebagian telah dilindungi oleh Undang-Undang.

c. Burung

Kawasan Taman Nasional Way Kambas memiliki sedikitnya 286 jenis burung, diantaranya yaitu Rangkong (*Bucerotidae*), Kuntul Putih (*Egreta sp*), Beo (*Gracula religiosa*), dan Ayam Hutan (*Gallus gallus*). Di beberapa kawasan Taman Nasional Way Kambas terdapat juga habitat burung migran.

d. Ikan

Taman Nasional Way Kambas terletak pada daerah *low land* atau dataran rendah dengan jumlah sungai yang sangat banyak. Berdasarkan sejarahnya, di kawasan ini pernah hidup ikan arwana. Berdasarkan hasil penelitian LIPI bahwa saat ini telah ditemukan 70 jenis ikan yang hidup di Taman Nasional Way Kambas. Namun belum teridentifikasi secara keseluruhan, sehingga manfaatnya belum diketahui secara maksimal. Dari hasil tersebut, diinformasikan bahwa 5 jenis diantaranya merupakan kualitas ekspor.

Selain dari yang telah disebutkan tersebut, di Taman Nasional Way Kambas ini juga terdapat jenis-jenis reptil, seperti buaya sinyulong, buaya muara, kura-kura, labi-labi, dan jenis ular.

6. Potensi Wisata Alam di Taman Nasional Way Kambas

Kombinasi dan interaksi antara keanekaragaman hayati berupa tumbuhan, satwa, dan lingkungan abiotiknya telah membentuk suatu objek yang menarik untuk dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, atau hanya sekadar dinikmati keindahannya. Dengan keanekaragaman hayati baik kekayaan flora dan faunanya merupakan potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata alam. Berdasarkan lokasi sebagai daerah yang sering dikunjungi antara lain Pusat Konservasi Gajah (PKG), Suaka Rhino Sumatera, Way Kanan dan sekitarnya, Pantai Kuala Kambas, dan lainnya.

a. Plang Ijo

Dinamai Plang Ijo karena pada awalnya pengelolaan pada pintu masuk tersebut nuansa bangunan didominasi oleh warna hijau. Dan konon yang paling khas sebagai penegas adalah terdapat tanda atau plang yang berwarna hijau. Sehingga sampai saat ini dikenal dengan Plang Ijo. Berjarak lebih kurang 6 km dari jalan nasional Lintas Pantai

Timur Sumatera, merupakan pintu gerbang utama menuju objek wisata yang berada di Taman Nasional Way Kambas. Lokasi ini berdasarkan wilayah pemangkuan terletak di Resort Pengelolaan Taman Nasional Rawa Bunder, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas III Kuala Penet. Secara administrasi masuk ke dalam Desa Labuhan Ratu IX, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Aktivitas yang dapat dilakukan di Plang Ijo antara lain berkemah dan tempat pendidikan lingkungan. Beberapa objek di sekitar Plang Ijo antara lain Areal Tanaman Eks JICA, dengan luas 361 ha dengan berbagai jenis tanaman endemik seperti meranti, gaharu, puspa, sempu, gelam, renghas, bungur, sungkai, dan lainnya. Untuk menuju lokasi tersebut telah tersedia jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terdapat juga menara sebanyak 2 buah dengan ketinggian 18 m yang dapat dimanfaatkan untuk mengamati kondisi vegetasi kawasan dan luar kawasan hutan. Menara tersebut sangat berguna untuk pemantauan kebakaran hutan, pemantauan satwa, dan lainnya.

Adapun fasilitas yang terdapat di Plang Ijo antara lain:

- Kantor Seksi Pengelolaan
- *Camping ground*
- Hutan Pendidikan Lingkungan atau HPL Plang Ijo

- Kantor Resort Pengelolaan
- Mushola
- MCK
- Sarana parkir

b. Pusat Konservasi Gajah (PKG)

Pada dasarnya Taman Nasional Way Kambas melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati yang bersifat masih liar, baik flora maupun faunanya, salah satu jenis satwa liar yang dikelola secara lebih intensif adalah gajah yang di tempatkan dalam satu tempat yang lebih dikenal dengan sebutan Pusat Konservasi Gajah (PKG). Dengan semakin berkembangnya pengelolaan ternyata PKG mampu menarik wisatawan yang ingin melihat dari dekat aktivitas gajah yang telah dijinakkan tersebut. Pada awalnya pendirian PKG ditujukan untuk mengurangi konflik antara gajah dengan manusia. Harapan ke depan PKG harus mampu menjadi pusat konservasi gajah dengan kualitas *breeding*, pusat wisata unggulan di Lampung. Untuk itu perlu ditunjang dengan keterampilan gajah yang memadai, kesehatan dan nutrisi gajah serta pelayanan yang prima.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan PKG diharapkan mampu melepasliarkan gajah yang telah berhasil dikembangkan. Dengan adanya kecenderungan populasi gajah liar di alam mengalami

penurunan populasi karena perburuan dan lain sebab. Pusat Konservasi Gajah (PKG) dengan gajah-gajah yang terlatih terdiri dari gajah tangkap, latih, atraksi, kerja, dan lainnya. Pemanfaatan gajah antara lain untuk membantu penanganan konflik manusia dan satwa, penyelamatan satwa, patroli pengamanan, dan alat transportasi dalam rangka mendukung pengendalian kebakaran hutan.

Beberapa jenis pilihan atraksi wisata alam dengan objek utama gajah yang dapat dinikmati antara lain:

- *Jungle tracking/safari night*, yaitu menyusuri lokasi PKG dan sekitarnya dengan menunggang gajah.
- Atraksi gajah, yaitu melihat berbagai keahlian gajah seperti joget, parade, menendang bola, melangkahi deretan manusia yang terbaring, dan lainnya.
- Naik kereta gajah.
- Melihat Gajah berenang, dan lainnya.

Adapun fasilitas yang tersedia di Pusat Konservasi Gajah (PKG), diantaranya:

- Kantor Pengelolaan Pusat Konservasi Gajah
- Arena atraksi gajah
- Arena tunggang gajah
- MCK
- Mushola

- Parkir
- Pusat informasi
- Sarana bermain
- Kereta gajah
- Kios penjual souvenir
- Rumah Sakit Gajah

Untuk aksesibilitas atau keterjangkauan lokasi dapat dicapai dengan mudah, berada di dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan jarak 16 km dari Jalan Lintas Timur, 9 km dari pintu masuk Plang Ijo. Dengan menempuh waktu kurang dari 20 menit, PKG mudah dijangkau karena telah dihubungkan dengan jalan aspal yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4.

c. Suaka Rhino Sumatera (SRS)

Suaka Rhino Sumatera (SRS) adalah tempat konservasi semi-insitu (usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya) satu-satunya di Indonesia bahkan dunia. Lokasi ini berada di tengah-tengah kawasan hutan, terletak antara ruas Jalan Plang Ijo dan Way Kanan, dengan jarak tempuh lebih kurang 8 km dari pintu Plang Ijo. Lokasi tersebut sangat mudah dijangkau, dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dibangun dengan tujuan khusus oleh Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal PHPA sekarang PHKA

kerjasama dengan Yayasan Mitra Rhino (YMR) dan saat ini telah berubah menjadi Yayasan Badak Indonesia (YABI). Bahwa tujuan awal dibangunnya SRS merupakan tempat yang diperuntukkan untuk penyelamatan badak secara semi-insitu. Setelah diketahui bahwa keberadaan badak Sumatera baik di alam ataupun di lembaga konservasi seperti kebun binatang mengalami kematian akibat penyakit ataupun karena lainnya.

Dengan kandang seluas 100 ha, terbagi menjadi 10 petak dikelilingi oleh pagar beraliran listrik untuk mencegah gangguan satwa liar lainnya atau untuk mengamankan badak yang ada di dalam kawasan. Untuk mempermudah akses dan kebutuhan lainnya, di sekeliling pagar tersebut telah dibuat jalan melingkar yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 4. Adapun jumlah badak sampai dengan sekarang yaitu berjumlah 4 ekor yaitu Bina, Ratu, Rosa, dan Andalas.

Untuk dapat mengamati atau melihat langsung aktivitas badak yang dilepaskan dalam hutan berpagar dapat dilakukan setelah melalui serangkaian proses yang cukup ketat yang ditetapkan oleh otoritas pengelola baik pihak Taman Nasional Way Kambas maupun manajemen SRS sendiri. Tidak hanya aktivitas dan perilaku badak yang dapat diamati, namun juga pada waktu tertentu dapat mendengarkan lengkingan suara asli siamang. Adapun fasilitas yang

tersedia yaitu kantor pengelola, *visitor centre*, MCK, wisma tamu, dan jalan untuk pengamatan burung.

d. Way Kanan

Berdasarkan wilayah pemangku pengelolaan, Way Kanan termasuk ke dalam wilayah Resort Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, Seksi Pengelolaan I. Dengan jarak 13 km dari pintu gerbang Plang Ijo, terhubung oleh jalan dart sebagian beraspal, dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan menempuh jarak sekitar 20-30 menit.

Sebelum tiba di Way Kanan, dalam perjalanan dari Plang Ijo menuju Way Kanan dapat pula dinikmati suasana hutan dataran rendah di sepanjang jalan, dan sesekali waktu bertemu dengan penghuninya seperti rusa, kupu-kupu, dan berbagai jenis ayam hutan. Sedangkan di sekitar Way Kanan dapat menikmati suasana hutan rimba yang masih alami, telah dibangun jalan setapak menembus rimba atau lebih dikenal dengan *jungle track* sepanjang 2,5 km. Dalam jalur tersebut, terdapat sekumpulan pohon mahoni yang merupakan peninggalan HPH, kupu-kupu warna-warni, berbagai jenis burung, ayam hutan, anggrek, dan lainnya. Lengkingan suara siamang juga dapat dinikmati di jam-jam tertentu. Selain area yang terdapat jalan setapak, dapat pula dinikmati

suasana pinggiran sungai, menyusuri sungai dengan menggunakan perahu untuk jarak yang tidak terlalu jauh.

Di samping itu, untuk kepentingan wisata minat khusus, Way Kanan merupakan salah satu tujuan favorit khususnya untuk pendidikan, lapangan serta penelitian. Beberapa objek di sekitar Way Kanan yang layak dikunjungi antara lain yaitu:

- Rawa gajah. Dengan menggunakan perahu dan memerlukan waktu sekitar 5 menit kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 15 menit menuju Rawa Gajah 1, 2,3. Di rawa ini dapat melakukan pengamatan burung dan terkadang ditemui satwa lainnya. Objek lainnya dapat diteruskan ke Ulung-Ulung 1, 2,3 yang dapat ditempuh selama 30 menit dengan berjalan santai.
- Kalibiru, yaitu sebuah wilayah yang terdiri dari 2 lokasi yaitu Pos Kalibiru dan Rawa Kalibiru. Pos Kalibiru dapat ditempuh dengan menggunakan perahu selama perjalanan 30 menit. Di lokasi tersebut dapat dinikmati suasana sungai sekaligus untuk mengamati burung. Sedangkan untuk menuju Rawa Kalibiru dapat ditempuh dengan berjalan kaki 30 menit. Rawa Kalibiru pada hamparan padang rumput yang cukup luas, waktu musim penghujan sebagian besar tergenang air seperti danau. Terdapat menara pemantau untuk melakukan pengamatan satwa khususnya rusa sambar yang sedang mencari rumput dan minum di pinggir rawa.

- Kali Pasir, yaitu salah satu lokasi sebagai tempat hidup siamang sehingga untuk melihat aktivitas siamang merupakan salah satu lokasi yang strategis dan layak untuk dipilih.

Adapun fasilitas yang tersedia untuk mendukung aktivitas pengunjung di Way Kanan yaitu telah tersedia beberapa fasilitas seperti wisma tamu, kantor pengelola, ruang pertemuan, parkir, perahu, dermaga dan beberapa alat pengamatan burung dan rusa.

e. Kuala Kambas

Dengan panjang pantai yang merupakan batas kawasan Taman Nasional Way Kambas sebelah Timur lebih kurang 75 km. Salah satu pantai yang memiliki panorama dan suasana yang layak untuk dikunjungi adalah Pantai Kuala Kambas. Di belakang pantai dijumpai tegakan cemara laut, ketapang, mangrove, dan vegetasi lainnya. Tidak hanya suasana pantainya, namun juga terdapat aktivitas nelayan yang cukup menarik untuk diperhatikan. Lokasi ini juga dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu jalur dalam dan jalur luar.

- Jalur dalam, menyusuri sungai Way Kanan dari Pos Way Kanan menuju Pantai Kuala Kambas dengan waktu tempuh 1 jam. Walaupun menempuh waktu yang relatif lama dengan keindahan vegetasi kanan kiri sungai dapat menghilangkan kejenuhan yaitu

mengamati berbagai aktivitas satwa liar seperti kera, buaya, dan burung.

- Jalur luar, dapat ditempuh melalui Kuala Penet dengan menggunakan perahu. Waktu yang diperlukan relatif sama seperti jalur dalam yaitu 1 jam perjalanan.

Fasilitas yang tersedia di Kuala Kambas saat ini masih perlu ditingkatkan, bagi pengunjung yang ingin pergi ke Pantai Kuala Kambas perlu mempersiapkan bekal dari pemberangkatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan lokasi lainnya dapat dijadikan alternatif, antara lain Wako dan Kuala Sekapuk, Kuala Penet, Tegal Yoso, Penanggungan, Rasau, dan Cabang.

7. Daerah atau Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas

Taman Nasional Way Kambas secara administrasi pemerintahan keseluruhan wilayahnya berada di Kabupaten Lampung Timur. Dengan menempati 1/3 dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur, batas kawasan ini secara langsung berbatasan dengan 37 desa, 11 kecamatan, dan 3 kabupaten, yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Desa membentang dari wilayah Selatan sampai dengan Utara yang terletak di bagian Barat kawasan dan pada Timur kawasan dibatasi oleh Pantai Timur Laut Jawa.

a. Demografi

1. Struktur Penduduk

Keadaan penduduk daerah penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas berdasarkan struktur *seks ratio* atau jenis kelamin, terdapat kecenderungan bahwa kuantitas penduduk perempuan dewasa lebih besar daripada penduduk laki-laki dewasa. Struktur tersebut berbeda dengan kecenderungan penduduk pada usia anak-anak, rata-rata pada anak laki-laki lebih besar daripada penduduk anak perempuan.

2. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di daerah sekitar Taman Nasional Way Kambas relatif rendah. Dari 37 desa yang mengelilingi kawasan tersebut, tingkat kepadatan penduduknya berada pada kisaran 200-300 orang/km². Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Rantau Udik II dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Desa Labuhan Ratu IX, dengan pertumbuhan penduduk sekitar 0,9%.

b. Status Sosial Ekonomi

1. Sosial Budaya

Penduduk yang tersebar di 11 kecamatan yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat keberadaannya, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli sebagian besar berada di Kecamatan Sukadana dan Way Jepara, sedangkan penduduk pendatang seperti dari Jawa dan Bali menyebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di sekitar kawasan. Penduduk pendatang lainnya seperti suku Melayu, Bugis, Serang, dan Batak banyak bermukim di daerah pesisir. Sebagian besar penduduk tersebut 95% memeluk agama Islam, sedangkan sisanya beragama Khatolik, Kristen, Hindu, dan Budha serta aliran kepercayaan.

Sedangkan penduduk yang menempati wilayah di desa penyangga didominasi oleh para pendatang terutama dari Pulau Jawa. Kedatangan pendatang tersebut diawali dengan adanya program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan yang dikenal dengan program transmigrasi. Namun sebagian besar desa yang berbatasan dengan kawasan merupakan hasil pengembangan desa induknya yang bukan daerah transmigrasi.

2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian ditentukan oleh peranan sektor-sektor ekonomi yang ada dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dan nilai tambah yang dicapai oleh setiap sektor ekonomi memberi gambaran besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap produk-produk tersebut. Dalam struktur perekonomian di daerah sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas, peran sektor pertanian masih mendominasi, sedangkan sektor industri dan jasa masih belum memberikan peranan yang penting. Sektor perdagangan masih berkisar kepada usaha perdagangan kecil. Dengan dominasi terbesar dari sektor pertanian yang diperoleh dari lahan marginal, hal ini membawa permasalahan tersendiri yaitu hasil produksi yang rendah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat sebagian besar belum mengalami perbaikan yang diharapkan.

3. Pola Penggunaan Lahan

Daerah penyangga atau desa penyangga yang berada di kawasan Taman Nasional Way Kambas hampir secara keseluruhan peruntukkannya digunakan untuk lahan pertanian, baik oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan di bidang pertanian atau perkebunan. Budaya penggunaan lahan secara garis besar terbagi

menjadi 2, antara budaya lokal dan pendatang. Penduduk asli pada umumnya menggunakan lahannya melalui pola pertanian lahan kering. Pola pertanian lahan kering ini berupa kebun lada, kelapa, durian, karet, kelapa sawit, dan singkong. Pola penggunaan lahan basah berupa persawahan banyak dilakukan oleh penduduk pendatang, khususnya penduduk dari Jawa.

Untuk lahan pemukiman selain sebagai tempat tinggal, juga diusahakan sebagai pekarangan dengan tanaman kebutuhan sehari-hari. Khusus untuk daerah penyangga pemanfaatan lahan kering terbagi menjadi 2 kelompok yaitu singkong dan tanaman perkebunan seperti karet dan sawit. Untuk daerah yang mengalami gangguan gajah dengan frekuensi cukup tinggi jenis tanaman yang dipilih untuk jenis yang tidak disukai gajah.

B. Gambaran Umum tentang Desa Harjosari

1. Sejarah Singkat Desa Harjosari

Desa Harjosari terletak di Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Braja Harjosari mula-mula dibuka pertama kali pada awal tahun 1958 oleh Jawatan Transmigrasi Seksi Way Jepara oleh Bapak Harjo, waktu itu angkatan pertama berasal dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali dengan jumlah sekitar 326 KK dan 996 jiwa,

dengan kepala rombongan Bapak Abu Naim. Lalu transmigrasi kedua pada tahun 1960 sejumlah kurang lebih 47 KK dengan 117 jiwa yang didatangkan dari Pulau Bali. Untuk pertama kalinya wilayah Desa Braja Harjosari memiliki kecamatan yang terletak di Labuhan Maringgai, lalu kemudian beralih di Kecamatan Way Jepara. Adapun batas Desa Braja Harjosari, yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Braja Yekti dan kawasan Taman Nasional
Way Kambas
- Sebelah Timur : Desa Braja Kencana
- Sebelah Selatan : Desa Braja Gemilang atau Braja Caka
- Sebelah Barat : Desa Braja Indah

Peserta transmigrasi tersebut mendapat jaminan hidup selama 1 tahun seperti sembako dan bantuan bibit juga jatah tanah $\frac{1}{4}$ ha untuk pekarangan dan $\frac{3}{4}$ ha untuk perladangan dan 1 ha untuk persawahan dan mendapatkan rumah tempat tinggal dengan ukuran 5 x 8 m beratap sirap berdinding papan dan mendapatkan alat pertanian seperti cangkul, golok, sabit, dan lainnya. Luas Desa Braja Harjosari yaitu 1075 ha, semakin hari semakin berkembang berkat usaha yang Bapak Abu Naim, seperti mendatangkan guru, ustad, dan mantri dari Jawa yang biayanya dengan berswadaya masyarakat Desa Braja Harjosari. Usaha lainnya yaitu mendirikan pasar, tempat ibadah, sekolah, puskesmas, dan lainnya. Desa Braja Harjosari selangkah lebih maju dari desa di sekitarnya kala itu.

Dahulu seorang nenek moyang masyarakat Way Jepara bernama Manik Brajo Selebah yang selanjutnya para pemuka dan tetua kampung berembuk menamai nama-nama desa transmigrasi berdasarkan abjad A,B,C dan seterusnya. Pada tahun 1999 Kecamatan Way Jepara dipecah menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Braja Selebah. Kecamatan Braja Selebah di wilayah Timur Kecamatan Way Jepara yang terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Braja Indah, Braja Yekti, Braja Harjosari, Braja Gemilang, Braja Kencana, Braja Luhur, dan Braja Mulya. Adapun urutan nama-nama kepala desa dan pejabat Desa Braja Harjosari terhitung dari tahun 1958 sampai dengan sekarang, yaitu:

Tabel 4 Nama Kepala Desa Braja Harjosari

No	Nama	Jabatan	Tahun
1.	Abu Naim	Kepala Desa	1958 – 1978
2.	M. Syadeli	Kepala Desa	1978 – 1989
3.	Sumardi S	Kepala Desa	1989-1997
4.	M. Wakiyo	Pjs. Kepala Desa	1997-1999
5.	Suwardi	Kepala Desa	1999-2004
6.	Fukuludin Asyadullah	Pjs. Kepala Desa	2004-2006
7.	Hardi Sumitro, S.Pd	Pjs. Kepala Desa	2006-2008
8.	Ahmad Yakir	Pjs. Kepala Desa	2008-2011
9.	Misbaqul Munir, S.Ag	Kepala Desa	2011-sekarang

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Keadaan umum Desa Braja Harjosari secara geografis ekonomi sosial dan budaya relatif dan beragam, yang merupakan desa penyangga kawasan Taman Nasional Way Kambas dan penduduknya terdiri dari Suku Jawa

95%, Suku Bali 4%, dan lainnya 1%. Merupakan desa paling maju diantara desa sekitarnya. Secara umum topografi Desa Braja Harjosari adalah dataran rendah dengan jarak 20 km dari lautan dan memiliki tingkat kesuburan tanah yang sedang dengan mengandung unsur hara 0,5 m. Sekitar 90% masyarakat Desa Braja Harjosari bekerja di bidang agraria, lainnya seperti pedagang, pegawai, dan lainnya.

Desa Braja Harjosari saat ini memiliki 8 Dusun dan 33 RT dengan jumlah 5391 jiwa dan 1542 KK. Kondisi sosial masyarakat Desa Braja Harjosari yang heterogen dan majemuk serta memegang adat istiadat yang berbeda namun senantiasa mengedepankan kerukunan yang sinergis antar umatnya. Masyarakat Desa Braja Harjosari yang mayoritas petani tentu berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan yang relatif dan bervariasi.

2. Kondisi Geografis

a. Luas dan Batas Desa Braja Harjosari

Secara geografis, Desa Braja Harjosari memiliki luas wilayah 1075 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Braja Yekti dan kawasan Taman Nasional
Way Kambas

Sebelah Timur : Desa Braja Kencana

Sebelah Selatan : Desa Braja Gemilang atau Braja Caka

Sebelah Barat : Desa Braja Indah

Adapun luas wilayah menurut penggunaan sebagai berikut:

Tabel. 5 Luas Wilayah Desa Braja Harjosari

No	Peruntukan Wilayah	Luas
1.	Pemukiman	146 Ha
2.	Persawahan	536 Ha
3.	Perladangan	97 Ha
4.	Perkebunan	173 Ha
5.	Pekarangan	86,5 Ha
6.	Lapangan	2 Ha
7.	Kuburan	2 Ha
8.	Perkantoran	1,5 Ha
9.	Prasarana Umum	16 Ha
10.	Tanaman Hutan	15 Ha
Jumlah		1075 Ha

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Jumlah luas wilayah di Desa Braja Harjosari secara keseluruhan yaitu 1075 Ha dengan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk wilayah persawahan seluas 536 Ha, dilanjutkan dengan peruntukan wilayah sebagai lahan perkebunan seluas 173 Ha, dan untuk luas wilayah pemukiman masyarakat yaitu seluas 146 Ha. Selain itu, luas lahan di Desa Braja Harjosari diperuntukkan untuk lahan perladangan seluas 97 Ha, lahan untuk pekarangan seluas 86,5 Ha, lahan untuk prasarana umum seluas 16 Ha, lahan untuk tanaman hutan seluas 15 Ha, dan lahan untuk lapangan serta

kuburan yang masing-masing seluas 2 Ha. Adapun wilayah-wilayah Desa Braja Harjosari berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas.

b. Orbitasi

Tabel. 6 Orbitasi Desa Braja Harjosari

Orbitasi	Jarak	Waktu Tempuh
Jarak dari Kota Kecamatan	1 Km	5 menit
Jarak dari Kota Kabupaten	36 Km	1 jam
Jarak dari Kota Provinsi	100 Km	3 jam

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Adapun orbitasi atau jarak keterjangkauan menuju Desa Braja Harjosari dari kota kecamatan, yaitu Kecamatan Braja Slebah berjarak 1 km dengan waktu tempuh 5 menit, dari kota kabupaten yaitu Sukadana berjarak 36 km dengan jarak tempuh 1 jam, dan dari kota provinsi yaitu Bandar Lampung berjarak 100 km dengan waktu tempuh 3 jam perjalanan.

c. Sarana dan Prasarana

Tabel. 7 Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
Panjang jalan aspal lataston	6 km	3 km rusak
Panjang jalan aspal latasir	4 km	3 km rusak
Panjang jalan onderlah	7 km	2 km rusak
Panjang jalan tanah	27 km	3 km rusak
Jembatan beton	16 buah	Baik
Jembatan besi	1 buah	Sedang
Gorong-gorong plat beton	46 buah	Baik

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Untuk sarana dan prasarana yang ada di Desa Braja Harjosari, dapat dilihat dari data di atas. Untuk jalan aspal lataston memiliki jarak yaitu 6 km dengan kondisi 3 km rusak, jalan aspal latasir memiliki jarak yaitu 4 km dengan kondisi 3 km rusak, jalan onderlah memiliki jarak 7 km dengan kondisi 2 km rusak, jalan tanah dengan jarak 27 km dengan kondisi 3 km rusak, selain sarana prasarana berupa jalan terdapat juga jembatan beton sejumlah 16 buah dengan kondisi baik, jembatan besi sejumlah 1 buah dengan kondisi sedang, dan gorong-gorong plat beton sejumlah 46 buah dengan kondisi yang baik.

Tabel. 8 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Desa Braja Harjosari

Jenis Saran dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
TELKOM	1 unit	Baik
WARNET	3 tempat	Baik
Handphone	2300 buah	-
Radio	245 buah	-
TV	1459 buah	-
Parabola	210 unit	-
Surat kabar	2 buah	Harian
Papan pengumuman	2 tempat	Baik
Pos	-	-
Mobile internet	1 unit	Baik

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Dari data di atas dapat dilihat jika sarana dan prasarana komunikasi dan informasi masyarakat di Desa Braja Harjosari didominasi dengan penggunaan telepon genggam atau *handphone* yang berjumlah 2300 buah. Adapun sarana dan prasarana lainnya yaitu seperti TELKOM yang berjumlah 1 buah dengan kondisi yang baik, WARNET yang terdapat 3 tempat dengan kondisi yang baik, lalu terdapat juga surat kabar dari 2 surat kabar harian, papan pengumuman yang terdapat di 2 tempat dengan kondisi yang baik, dan juga *Imobile* internet yang berjumlah 1 unit dengan kondisi yang baik.

Tabel. 9 Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Sumur gali	1367 buah
Sumur bor	23 buah
Sumur umum	2 buah
MCK umum	2 buah
WC permanen	1251 keluarga
WC cemplung	162 keluarga

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Untuk sarana dan prasarana air bersih, masyarakat Desa Braja Harjosari didominasi dengan penggunaan sumur gali yaitu berjumlah 1367 buah, dan untuk pembuangan atau WC menggunakan WC permanen yang berjumlah 1251 keluarga yang menggunakannya. Adapun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lainnya yaitu sumur bor yang berjumlah 23 buah, sumur umum dan MCK umum berjumlah masing-masing 2 buah, serta WC cemplung yang berjumlah 162 keluarga yang menggunakannya.

Tabel. 10 Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Masjid	9 buah
Mushola	20 buah
Pura	2 buah

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Untuk sarana dan prasarana di Desa Braja Harjosari didominasi dengan rumah ibadah mushola yang berjumlah 20 buah, masjid 9 buah, dan pura 2 buah.

Tabel. 11 Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Lapangan sepak bola	2 buah
Lapangan bulu tangkis	4 buah
Lapangan bola voly	5 buah
Lapangan futsal	1 buah
Lapangan tenis meja	2 buah
Gedung olahraga atau GOR	2 buah

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Adapun sarana dan prasarana olahraga di Desa Braja Harjosari terdapat beberapa lapangan seperti lapangan sepak bola yang berjumlah 2 buah, lapangan bulu tangkis yang berjumlah 4 buah, lapangan bola voly yang berjumlah 5 buah, lapangan futsal yang berjumlah 1 buah, dan lapangan tenis meja yang berjumlah 2 buah. Selain itu terdapat juga 2 buah gedung olahraga atau GOR untuk menunjang kebutuhan masyarakat di bidang olahraga.

Tabel. 12 Sarana dan Prasarana Hiburan dan Wisata Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Water park	1 buah
Gras Track	1 buah
Pemancingan ikan	1 buah

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Di Desa Braja Harjosari terdapat beberapa sarana dan prasarana hiburan dan wisata. Selain memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Way Kambas, Desa Braja Harjosari memiliki *water park*, *gras track*, juga pemancingan ikan yang masing-masing berjumlah 1 buah.

Tabel. 13 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Puskesmas	1 unit
Puskesmas rawat inap	1 unit
Balai pengobatan	1 unit
Poskesdes	1 unit
Posyandu	6 kelompok
Apotek	2 tempat
Rumah bersalin	2 tempat
Toko obat	1 tempat
Praktek dokter	1 tempat
Praktek bidan/mantri	2 tempat

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Dari data di atas, terlihat Desa Braja Harjosari cukup memadai untuk sarana dan prasarana kesehatan masyarakatnya. Terlihat

terdapat puskesmas, puskesmas rawat inap, balai pengobatan, poskesdes, toko obat, dan praktek dokter yang masing-masing berjumlah 1 unit, lalu terdapat juga 6 kelompok posyandu, dan apotek, rumah bersalin, dan praktek bidan atau mantri berjumlah masing-masing 2 unit yang dapat menunjang kesehatan masyarakat Desa Braja Harjosari.

Tabel 14 Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9 buah
Taman Kanak-kanak (TK)	7 buah
Sekolah Dasar (SD/MI)	6 buah
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	5 buah
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	7 buah
Perguruan tinggi	1 buah

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Untuk sarana dan prasarana pendidikan, Desa Braja Harjosari memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun PAUD yang berjumlah 9 buah, TK 7 buah, SD/MI 6 buah, SMP/MTs 5 buah, SMA/SMK 7 buah, dan perguruan tinggi 1 buah.

Tabel. 15 Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Desa Braja Harjosari

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Pondok pesantren	4 buah
Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)	8 buah
Lembaga kursus atau kelompok belajar	6 buah

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Selain memiliki sarana dan prasarana pendidikan formal, terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan non formal yang terdapat di Desa Braja Harjosari, seperti pondok pesantren yang berjumlah 4 buah, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang berjumlah 8 buah, dan lembaga kursus atau kelompok belajar yang dapat membantu pendidikan non formal masyarakat sekitar berjumlah 6 buah.

d. Sketsa Wilayah Desa Braja Harjosari

Secara geografis, Desa Braja Harjosari memiliki luas wilayah 1075 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Braja Yekti dan kawasan Taman Nasional
Way Kambas

Sebelah Timur : Desa Braja Kencana

Sebelah Selatan : Desa Braja Gemilang atau Braja Caka

Sebelah Barat : Desa Braja Indah



Gambar 4 Skema Wilayah Desa Braja Harjosari
(Sumber:Google Maps, 2017)

Pada gambar tersebut, wilayah Desa Braja Harjosari ditandai dengan wilayah yang bergaris merah, dan Desa Braja Harjosari memiliki wilayah yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas yang ditandai dengan warna hijau.

3. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Tabel. 16 Jumlah Penduduk di Desa Braja Harjosari

Jumlah penduduk laki-laki	2750 jiwa
Jumlah penduduk perempuan	2641 jiwa
Jumlah	5391 jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Desa Braja Harjosari memiliki jumlah penduduk sebesar 5391 jiwa (Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016), yang terdiri dari 2750 jiwa penduduk laki-laki, dan 2641 jiwa penduduk perempuan.

Tabel. 17 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Braja Harjosari

Jumlah kepala keluarga laki-laki	1439 KK
Jumlah kepala keluarga perempuan	103 KK
Jumlah	1542 KK

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Dengan jumlah penduduk desa sebesar 5391 jiwa, terdapat juga jumlah kepala keluarga sebesar 1542 KK yang terdiri atas 1439 KK laki-laki, dan 103 KK perempuan (Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016).

b. Kondisi Status Sosial Ekonomi

Tabel. 18 Mata Pencarian Masyarakat Desa Braja Harjosari

Mata Pencarian	Jumlah
Petani	925 orang
Buruh tani	136 orang
Buruh bangunan	76 orang
Buruh perkebunan	65 orang
Pedagang	98 orang
Peternak	24 orang

Nelayan	2 orang
Montir	2 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	89 orang
Pegawai swasta	80 orang
Dokter swasta	1 orang
Bidan swasta	5 orang
Mantri swasta	2 orang
Pewrawat swasta	2 orang
POLRI	1 orang
TNI	1 orang
Pensiunan PNS/POLRI/TNI/BUMN/dll	35 orang
Pengrajin industri kecil	19 orang
Pengusaha	5 orang
Sopir	18 orang
Pemulung	3 orang
Jasa persewaan	4 orang

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Braja Harjosari yaitu di bidang pertanian, yaitu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 925 orang.

Tabel. 19 Agama Masyarakat Desa Braja Harjosari

Agama	Jumlah
Islam	4790 orang
Kristen	66 orang
Khatolik	101 orang
Hindu	434 orang
Budha	-

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Masyarakat Desa Braja Harjosari adalah masyarakat yang heterogen dan hidup damai. Masyarakat desa mayoritas yaitu beragama islam

dengan jumlah 4790 orang, lalu agama hindu sebanyak 434 orang, agama khatolik 101 orang, dan kristen 66 orang.

Tabel. 20 Etnis atau Suku Masyarakat Desa Braja Harjosari

Etnis atau Suku	Jumlah
Jawa	4636 orang
Sunda	297 orang
Lampung	10 orang
Minang	6 orang
Batak	3 orang
Bali	434 orang
Betawi	3 orang
Madura	2 orang

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Untuk suku atau etnis, Desa Braja Harjosari didominasi oleh masyarakat yang bersuku Jawa dengan jumlah 4636 orang lalu dilanjutkan oleh masyarakat yang bersuku Bali dengan jumlah 434 orang, lalu masyarakat bersuku Sunda dengan jumlah 297 orang, masyarakat bersuku Lampung dengan jumlah 10 orang, masyarakat bersuku Minang berjumlah 6 orang, masyarakat bersuku Madura berjumlah 2 orang, dan masyarakat bersuku Batak dan Betawi dengan masing-masing berjumlah 3 orang.

Tabel. 21 Pendidikan Masyarakat Desa Braja Harjosari

Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD/ sederajat	268 orang
Tamat SD/ sederajat	342 orang
Tamat SMP/ sederajat	589 orang

Tamat SMA/ sederajat	436 orang
Tamat D I/ sederajat	16 orang
Tamat D II/ sederajat	8 orang
Tamat D III/ sederajat	57 orang
Tamat S I/ sederajat	79 orang
Tamat S II/ sederajat	8 orang

Sumber: Data Monografi Desa Braja Harjosari, 2016

Masyarakat Desa Braja Harjosari mayoritas berpendidikan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) dengan jumlah 589 orang. Adapun untuk jumlah tidak tamat SD/ sederajat berjumlah 268 orang, tamatan SD/ sederajat berjumlah 342 orang, tamatan SMA/ sederajat berjumlah 436 orang, tamatan DI berjumlah 16 orang, DII berjumlah 8 orang, DIII 57 orang, tamatan S1 berjumlah 79 orang dan tamatan S2 berjumlah 8 orang.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, yaitu di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan sebagian besar responden mengungkapkan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan sudah berjalan dengan baik dan ada pengaruhnya terhadap peningkatan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan masyarakat. Adapun masyarakat Desa Braja Harjosari dapat meningkatkan status sosial ekonomi mereka dengan adanya beberapa program yang sudah ada dari pihak Taman Nasional Way Kambas, dan juga adanya kerja sama dan komunikasi yang baik. Program atau kebijakan tersebut diantaranya yaitu Desa Braja Harjosari menjadi desa

penyangga Taman Nasional way Kambas, dimana hal ini membuktikan bahwa ada kerjasama dan hubungan yang baik antar keduanya. Masyarakat juga dipersilahkan untuk bekerja di kawasan Taman Nasional Way Kambas, baik itu menjadi pemandu wisata, menyediakan jasa *homestay*, berdagang di wilayah Taman Nasional Way Kambas, menjadi pawang atau pelatih gajah, dan lainnya. Adapun pelatihan pertanian dan sosialisasi serta bantuan tambak ikan juga menjadi program dari Taman Nasional Way Kambas.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan sebagian besar responden mengungkapkan bahwa ada dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, khususnya dari segi pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan masyarakat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Braja Harjosari adalah adanya peningkatan di segi pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan masyarakat. Adapun indikator-indikator untuk mengkaji dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan yaitu indikator komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, melalui

wawancara bersama dengan pihak Taman Nasional Way Kambas terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan salah satunya didukung oleh adanya kerjasama dan komunikasi Taman Nasional Way Kambas bersama dengan masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, pihak swasta, dan NGO yang ada di Way Kambas. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan dana dalam mengelola Taman Nasional Way Kambas, seperti dana untuk perawatan dan kesehatan gajah.

Berdasarkan analisa dan interpretasi data melalui uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.0, maka diperoleh kesimpulan hasil perhitungan statistik uji F menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 140,421 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karenanya probabilitas $0,000 < 0,05$ (dalam kasus ini menggunakan taraf signifikansi yaitu 5 %) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($140,421 > 2,76$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Adapun persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini diperoleh persamaan yaitu $Y = 0,187 + 0,861X$. Artinya adalah konstanta

sebesar 0,187 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *independent* atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas ($X = 0$), maka status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan sebesar 0,187 dan koefisien regresi implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas bertambah positif sebesar 0,861. Artinya apabila terjadi perubahan implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas sebesar 1% maka akan ada kenaikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan sebesar 0,861.

B. Saran

Dalam rangka menyempurnakan hasil penelitian atau kesimpulan serta mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, maka dapat dirumuskan beberapa saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Mempertahankan atau meningkatkan status sosial ekonomi saat ini dan yang akan datang dengan ikut berpartisipasi, mengawasi, serta menjalin hubungan yang baik bersama dengan pihak Taman Nasional Way Kambas, pihak pemerintah, dan pihak swasta.

2. Bagi Taman Nasional Way Kambas

Dapat melakukan kerja sama yang baik bersama dengan masyarakat dan juga pihak pemerintah serta swasta, mamaksimalkan program-program atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, khususnya yang berdampak atau berpengaruh terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

3. Bagi Pemerintah

Dapat melakukan pengawasan dan kerja sama yang baik bersama dengan masyarakat dan juga pihak Taman Nasional Way Kambas, seperti program-program atau implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Way Kambas, khususnya yang berdampak atau berpengaruh terhadap status sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Cholid *Narbuko*, dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Friedman, M. Marilyn. 1998. *Keperawatan Keluarga : Teori dan Praktik*. Jakarta : EGC.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta: Rinheka Karsa.
- Husein, Umar. 1999. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik-Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kartono. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kemdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, M.Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mayor, Polak J.B.A.F. 1979. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru.
- Muhammad, Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyanto Sumardi, Hans Dieter Evers. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan. Pokok*, Jakarta:CV Rajawali.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nikijuluw. 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Jakarta: KKP.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solimun. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Svalastoga, Kaare. 1989. *Diferensiasi Sosial*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik; Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Weber, Max. 1956. *Economy and Society*, Los angeles: Universty of California Press.

Sumber Jurnal:

- Adyanandaputri, Winahyu. 2015. *Tugas Akhir Analisis Alokasi Anggaran Dalam Pengelolaan Taman Nasional Way Kambas*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ari, Rakatama. 2007. *Jurnal Ilmiah Kontribusi Aktivitas Wisata Alam Di Taman Nasional Way Kambas Terhadap Perekonomian Setempat*. Lampung: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.

Follet, Mary Parker. 1999. *Jurnal Ilmiah Visionary Leadership and Strategic Management. Women in Menegement Review Vol. 14, No. 7.* MCB University Press.

Islamy, M. Irfan, dkk. 2006. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. VI, No. 2, Maret-Agustus 2006: 299-415 State of the Art Metodologi Penelitian Administrasi Publik.* Malang: Universitas Brawijaya.

Sumber Dokumen:

Republik Indonesia. 1978. *Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tentang Kawasan Pelestarian Alam.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1985. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/1985 tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya AlamI.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1989. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Menhut-II/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Deklarasi Kawasan Taman Nasional.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1990. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1991. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144/Kpts-II/1991 tentang Deklarasi Kawasan Taman Nasional.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1997. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 185/Kpts-II/1997 tentang Balai Taman Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tentang Luas Kawasan Taman Nasional*. Sekretariat negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 56 /Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan*. Sekretariat. Jakarta.

_____. 2016. *Monografi Desa Braja Harjosari*. Kelurahan Braja Slebah. Kabupaten Lampung Timur.